



PEMKAB. TASIKMALAYA



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BPKPD T.A 2023



Komplek Perkantoran Jl. Sukapura V (0265) 543504

Fax. (0265) 543505 Kode Pos 46415

S I N G A P A R N A

Website : bpkpd.tasikmalayakab.go.id

email : bpkpd@tasikmalayakab.go.id



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH

Komplek Perkantoran Jl. Sukapura V ☎ (0265) 543504, Fax (0265) 543505
Website: bpkpd.tasikmalayakab.go.id; email: bpkpd@tasikmalayakab.go.id
Singaparna – 46415

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : RC 10.06/KEP.10/BPKPD/2024
LAMPIRAN : 1 (satu) lampiran

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2023

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib menyampaikan Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
15. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 65 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
16. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023;
18. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor PR 03.03/ Kep.58/ BPKPD/ 2021 tentang Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Uraian Tugas Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dari Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPKPD Tahun 2023 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan Di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 2 Januari 2024

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH,



Drf. RONLI A. SAHRONI, M.M
NIP. 19681008 198803 1 003

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : RC 10.06/KEP.10/BPKPD/2024
TANGGAL : 2 Januari 2024
TENTANG : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pada
Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD)
Tahun 2023

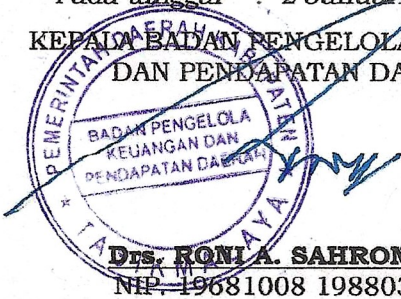
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (BPKPD)
TAHUN 2023

- KETUA** : **Drs. RONI A. SAHRONI, M.M**
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Tasikmalaya
- WAKIL KETUA** : **ARIF YUANA HAKIM, S.E.**
Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Tasikmalaya
- SEKRETARIS** : **SHORRICHUDDHUHA, S.Sos**
Perencana Ahli Muda
- ANGGOTA** : **1. Verawati, SE**
Perencana Ahli Pertama
2. Muthya Fuji Pratama, SE
Perencana Ahli Pertama
3. Rusy Laytifah Munggaran, SE
Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
4. Taufik Gunawan, S.Sos
Pengelola Bahan Perencanaan

Ditetapkan di : Tasikmalaya

Pada tanggal : 2 Januari 2024

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH,



Drs. RONI A. SAHRONI, M.M
NIP. 19681008 198803 1 003

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : RC 10.06/KEP.10/BPKPD/2024
TANGGAL : 2 Januari 2024
TENTANG : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pada
Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD)
Tahun 2023

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (BPKPD) TAHUN 2023

- KETUA** : Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023 yang meliputi bahan/materi, akomodasi, konsumsi, keamanan dan lain-lain.
- WAKIL KETUA** : Membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023.
- SEKRETARIS** : - Mengkoordinir seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kesekretariatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023;
- Mempersiapkan segala fasilitas kebutuhan yang diperlukan selama pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023.
- ANGGOTA** : - Melakukan penelitian atas kelengkapan seluruh bahan/materi dalam rangka Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023;
- Mempersiapkan Akomodasi, Konsumsi, Dokumentasi Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023;
- Melaksanakan pencetakan, penggandaan, pendistribusian, serta pengarsipan hasil pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan di : Tasikmalaya

Pada tanggal : 2 Januari 2024

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH,


Drs. RONIA SAHRONI, M.M
NIP. 19681008 198803 1 003



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH

Komplek Perkantoran Jl. Sukapura V ☎ (0265) 543504, Fax (0265) 543505
Website: bpkpd.tasikmalayakab.go.id; email: bpkpd@tasikmalayakab.go.id
Singaparna – 46415

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : RC 10.06/KEP.18/BPKPD/2024

LAMPIRAN : 1 (satu) lampiran

TENTANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2023

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib menyampaikan Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah Tahun 2023.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
15. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 65 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
16. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023;
18. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor PR 03.03/ Kep.58/ BPKPD/ 2021 tentang Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 sebagaimana lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan Di : Tasikmalaya

Pada Tanggal : 12 Februari 2024

KERAJAAN DAERAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH,



Drs. RONI A. SAHRONI, M.M
NIP. 19681008 198803 1 003

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Tasikmalaya dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah selama Tahun 2023, baik selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selama 1 (satu) tahun anggaran yang memuat ikhtisar pencapaian keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target dari program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan LKIP BPKPD Tahun 2023 ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kami menerima dengan tangan terbuka saran serta masukan agar kinerja kami semakin baik. Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat untuk bahan evaluasi kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Tasikmalaya, 12 Februari 2024

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya



Drs. RONI A. SAHRONI, M.M
NIP. 19681008 198803 1 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR GRAFIK.....	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	viii
1 BAB I PENDAHULUAN	1-1
1.1 Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi.....	1-2
1.2 Struktur Organisasi.....	1-3
1.3 Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana	1-6
1.4 Isu Aktual.....	1-9
1.5 Sistematika LKIP	1-11
2 BAB II PERENCANAAN KERJA	2-1
2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026.....	2-1
2.2 Tujuan	2-2
2.3 Sasaran	2-2
2.4 Indikator Kinerja Utama	2-4
2.5 Rencana Kinerja Tahunan (RKT).....	2-8
2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	2-9
3 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	3-2
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	3-5
3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	3-12
3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	3-19
3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis	3-26
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.....	3-29
3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan ...	3-31
3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	3-35
3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	3-37
3.2 Realisasi Anggaran.....	3-42

4 BAB IV PENUTUP4-1



DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Capaian Indikator Kinerja BPKPD Kab. Tasikmalaya Tahun 2023 (Berdasarkan RENSTRA BPKPD Tahun 2021-2026).....	X
Tabel I.2	Realisasi Anggaran Tahun 2023.....	XII
Tabel 1.1	Sarana dan Prasarana.....	1-7
Tabel 2.1	Sasaran Strategis Jangka Menengah BPKPD Tahun 2021-2026.....	2-4
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKPD Tahun 2023 (Berdasarkan RENSTRA BPKPD Tahun 2021-2026).....	2-5
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2023 (Berdasarkan RENSTRA BPKPD Tahun 2021-2026).....	2-8
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2023.....	2-10
Tabel 2.5	Anggaran Belanja Per Sasaran Strategis BPKPD Tahun 2023.....	2-11
Tabel 3.1	Skala Nilai Perangkat Kinerja 1.....	3-3
Tabel 3.2	Skala Nilai Perangkat Kinerja 2.....	3-3
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja BPKPD Kab. Tasikmalaya Tahun 2023 (Berdasarkan RENSTRA BPKPD Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2026).....	3-4
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Indikator Tujuan.....	3-5
Tabel 3.5	Hasil Penilaian IPKD Tahun 2023.....	3-7
Tabel 3.6	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	3-12
Tabel 3.7	Perbandingan antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun 2021 dan Tahun 2022.....	3-19
Tabel 3.8	Perbandingan Capaian Persentase BMD yang Telah Dilengkapi Dokumen Bukti Kepemilikan Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023	3-22
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Kinerja S.D Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah.....	3-26
Tabel 3.10	Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.....	3-29
Tabel 3.10	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya...	3-35

Tabel 3.11	Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	3-37
Tabel 3.12	Realisasi Kinerja dan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2023	3-44



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi..... 1-5



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Rekapitulasi pegawai berdasarkan golongan, pendidikan dan jenis kelamin	1-6
Grafik 3.2	Pertumbuhan Pajak Daerah.....	3-25
Grafik 3.3	Perbandingan capaian Tahun 2023 Indikator Kinerja Nilai Indeks Reformasi Birokrasi dengan target pada Periode Renstra 2021-2026.....	3-27
Grafik 3.4	Perbandingan capaian Tahun 2023 Indikator Kinerja Rata-rata persentase APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan target pada Periode Renstra 2021-2026.....	3-27
Grafik 3.5	Perbandingan capaian Tahun 2023 Indikator Kinerja Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi Dokumen Bukti Kepemilikan dengan target pada Periode Renstra 2021-2026...	3-27
Grafik 3.6	Perbandingan capaian Tahun 2023 Indikator Kinerja Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah dengan target pada Periode Renstra 2021-2026...	3-27



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2023 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2023. Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2023 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2023.

Penyusunan LKIP juga berfungsi untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan atas pencapaian kinerja yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan tahunan. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan daerah dan implementasi berbagai kebijakan daerah yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagaimana termuat dalam TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya No. 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta telah diatur dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya No 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai unsur penunjang urusan

pemerintahan dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah serta tugas lain yang diberikan Bupati

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) mendukung Visi dan Misi Bupati Tasikmalaya melalui pencapaian sasaran 6 yaitu **Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah** dengan indikator sasaran **Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)**. Untuk mendukung pencapaian tersebut maka di turunkan menjadi Tujuan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya yaitu “**Meningkatnya tata kelola keuangan yang akuntabel dan berorientasi pelayanan prima**”.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) BPKPD Tahun 2021-2026, sasaran strategis BPKPD terdiri dari 4 (empat) sasaran dan 4 (empat) indikator sasaran, sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
 - Nilai reformasi birokrasi perangkat daerah.
2. Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel;
 - Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel;
 - Persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan.
4. Meningkatnya pertumbuhan pajak daerah
 - Persentase pertumbuhan pajak daerah

Tabel I.1
Capaian Indikator Kinerja BPKPD Kab. Tasikmalaya
Tahun 2023
(berdasarkan Renstra BPKPD Tahun 2021 -2026)

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Sasaran Strategis 1 :					
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah					
1.1	Nilai reformasi birokrasi perangkat daerah	Nilai	69	78,07	113,14
Rata Rata Pencapaian Sasaran					113,14
Sasaran Strategis 2 :					
Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel					
2.1	Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	100	100	100
Rata Rata Pencapaian Sasaran					100
Sasaran Strategis 3 :					
Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel					
3.1	Persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan	%	83	84,68	102,02
Rata Rata Pencapaian Sasaran					102,02
Sasaran Strategis 4 :					
Meningkatnya pertumbuhan pajak daerah					
4.1	Persentase pertumbuhan pajak daerah	%	5,11	4,08	79,84
Rata Rata Pencapaian Sasaran					79,84
Rata Rata Pencapaian Per Sasaran					98,75

*Sumber: BPKPD TA 2023 (Data Sementara, *Unaudited* serta diolah) per 11 Januari 2024

Berdasarkan tabel di atas terdapat 4 (empat) sasaran strategis yang diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran/indikator kinerja utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Dari 4 indikator tersebut terdapat 2 (dua) indikator dengan hasil realisasi melampaui target yang telah ditetapkan yaitu Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan capaian kinerja 113,14% dan Persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan dengan capaian kinerja 102,02%. Indikator yang sesuai target dengan capaian 100% yaitu Rata-rata persentase penetapana APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan–undangan. Sedangkan untuk indikator persentase pertumbuhan pajak daerah tidak mencapai target yang telah ditetapkan dikarenakan terdapat beberapa hambatan diantaranya masih kurangnya sosialisasi dari Pemerintah

kepada masyarakat sebagai Wajib Pajak (WP) mengenai pentingnya membayar pajak, manfaat membayar pajak, dan sanksi yang akan diterima apabila WP melalaikan kewajibannya; database yang belum lengkap dan akurat; serta masih lemahnya penegakan hukum berupa pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan pajak daerah.

Seiring dengan upaya merealisasikan penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah telah melaksanakan berbagai upaya, salah satunya melalui pelaksanaan kegiatan dan program untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan. Pada tahun 2023 BPKPD melaksanakan 4 Program 12 Kegiatan dan 54 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 809.728.466.043,00 yang terdiri dari belanja untuk gaji dan tunjangan ASN BPKPD dan P3K sebesar Rp. 99.750.717.938,00 penyaluran belanja daerah sebesar Rp. 699.196.251.391,00 serta untuk kegiatan BPKPD sebesar Rp. 10.781.496.714,00.

Penyerapan total anggaran BPKPD pada tahun 2023 sebesar 90,44% dengan realisasi sebesar Rp. 732.327.095.840,00 dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 809.728.466.043,00. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada sasaran Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel sebesar 98,95%. Sedangkan penyerapan terkecil pada sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Akutabilitas Kinerja Perangkat Daerah sebesar 33,11%, penyerapan tersebut rendah dikarenakan sisa anggaran yang belum terserap merupakan gaji dan tunjangan untuk P3K Kabupaten Tasikmalaya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.2
Realisasi Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja			Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi
				Target	Realisasi	Capaian %				
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	69	78,07	113,14	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	104.503.039.652	34.603.091.049	33,11
2	Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel	Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	100	100	100,00	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	701.570.365.391	694.172.784.632	98,95
3	Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel	Persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan	%	83	84,68	102,02	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	624.000.000	610.273.240	97,80
4	Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	%	5,11	4,08	79,84	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.031.061.000	2.940.946.919	97,03
Total								809.728.466.043	732.327.095.840	90,44

*Sumber: BPKPD TA 2023 (Data Sementara, *Unaudited* serta diolah) per 11 Januari 2024

BAB I PENDAHULUAN

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya selaku perangkat daerah yang memiliki tugas sebagai fungsi penunjang urusan keuangan mendukung misi ke-2 (dua) yaitu **Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih, dan Profesional**, dengan tujuan daerah yaitu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik serta sasaran daerah meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Untuk dapat mewujudkan misi tersebut maka arah kebijakan yang dilakukan oleh BPKPD berdasarkan dokumen RPJMD yaitu Optimalisasi ketepatan alokasi dan distribusi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan pemenuhan pelayanan dasar, Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Mengacu pada tujuan dan sasaran diatas maka BPKPD berupaya melakukan kinerja dengan optimal memanfaatkan sumber daya yang dimiliki serta meningkatkan kualitas pencapaian kinerja dari tahun sebelumnya. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh BPKPD pada tahun 2023 yaitu :

1. Melakukan perencanaan, pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melakukan pengelolaan dan penatausahaan aset daerah serta pensertifikatan terhadap Tanah/ Bangunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan memfokuskan pada pensertifikatan ruas jalan milik Kabupaten Tasikmalaya;
3. Melakukan digitalisasi terhadap pelayanan yang dilakukan oleh BPKPD;
4. Meningkatkan pelayanan pajak daerah;
5. Melakukan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah khusus nya pada pajak dan retribusi daerah serta menyusun kebijakan/regulasi terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai tindak lanjut dari Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022

- tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai potensi pengembangan PAD;
6. Melakukan inovasi sebagai upaya dalam peningkatan pajak daerah di Kabupaten Tasikmalaya.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan kinerja ini juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja dan untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* untuk perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya laporan kinerja yang sesuai dengan ketentuan, maka akan terbentuk sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, *legitimate* yang diharapkan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

1.1 Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai peran yang sangat strategis di Kabupaten Tasikmalaya yaitu sebagai *stakeholders* dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pendapatan Daerah sehingga dapat

mendukung kelancaran roda pemerintahan daerah di Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah bahwa BPKPD mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Sedangkan Kedudukan, Tugas dan Fungsi diatur oleh Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
- b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
- c. Penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

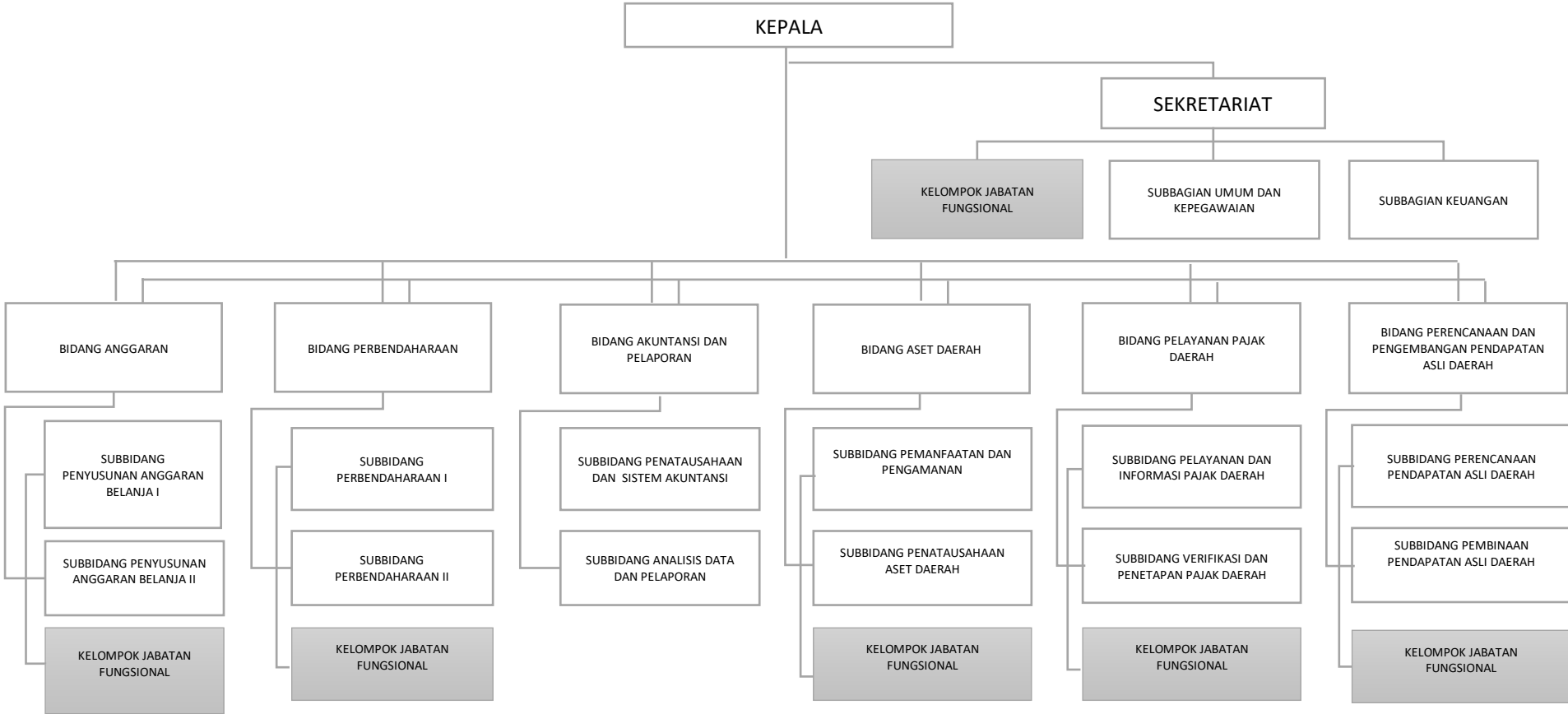
1.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi BPKPD menurut Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan. Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.

- c. Bidang Anggaran, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja I;
 - 2) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja II; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Perbendaharaan I;
 - 2) Sub Bidang Perbendaharaan II; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Penatausahaan dan Sistem Akuntansi; dan
 - 2) Sub Bidang Analisa Data dan Pelaporan.
- f. Bidang Aset Daerah, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan;
 - 2) Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Bidang Pelayanan Pajak Daerah, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Pelayanan dan Informasi Pajak Daerah;
 - 2) Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan Pajak Daerah; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah, terdiri atas :
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Asli Daerah;
 - 2) Sub Bidang Pembinaan Pendapatan Asli Daerah; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- i. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - Untuk lebih jelasnya mengenai bagan struktur organisasi BPKPD dapat dilihat dalam Gambar 1.1. sebagai berikut :

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi
 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya
 Menurut Perbup No. 119 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
 Fungsi Perangkat Daerah

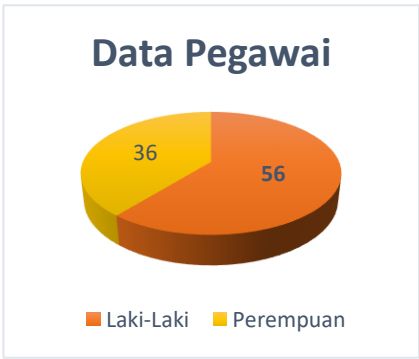
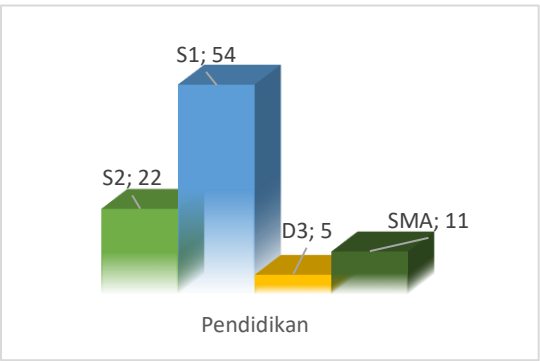
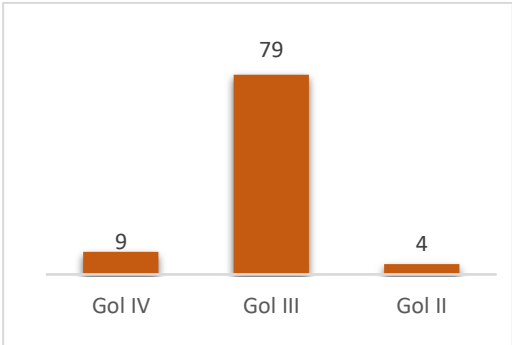


1.3 Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana

A. Kepegawaian

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian kinerja dan anggaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK), BPKPD dibantu oleh sumber daya manusia yang terampil dan tepat di bidangnya secara substansi. Sampai akhir tahun 2023, BPKPD Kabupaten Tasikmalaya memiliki pegawai berjumlah 92 orang yang terdiri dari 83 orang Struktural/Jabatan Fungsional Umum dan 9 orang Jabatan Fungsional Tertentu. Rincian sebaran pegawai di lingkungan BPKPD dapat diuraikan sebagai berikut:

Grafik 1.1
Rekapitulasi pegawai berdasarkan golongan, pendidikan dan jenis kelamin



B. Sarana dan Prasarana

Tabel 1.1
Sarana dan Prasarana

NO	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kondisi
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		1.595	Unit/Buah	Baik
1	ALAT BESAR	2	Unit	Baik
	- Stationary Generating Set	1	Unit	Baik
	- electric generating set lainnya (dst)	1	Unit	Baik
2	KOMPUTER	536		Baik
	- Mainframe (Komputer Jaringan)	2	Buah	Baik
	- Mini Komputer	3	Buah	Baik
	- Internet	1	Buah	Baik
	- P.C Unit	114	Buah	Baik
	- Laptop	92	Buah	Baik
	- Note Book	48	Buah	Baik
	- Tablet PC	16	Buah	Baik
	- Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1	Buah	Baik
	- Printer (Peralatan Personal Komputer)	129	Buah	Baik
	- Scanner (Peralatan Personal Komputer)	22	Buah	Baik
	Plotter (Peralatan Personal Komputer)	1	Buah	Baik
	- Peralatan Personal Komputer lainnya	15	Buah	Baik
	- Server	14	Buah	Baik
	- Router	1	Buah	Baik
	- Peralatan Jaringan lainnya	77	Buah	Baik
3	ALAT ANGKUTAN	87	Unit	Baik
	- Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	11	Unit	Baik
	- Pick Up	1	Unit	Baik
	- Sepeda Motor	75	Unit	Baik
4	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	29	Unit	Baik
	- Rol Meter	3	Unit	Baik
	- Global Positioning System	26	Unit	Baik
5	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	888	Buah	Baik
	- Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	26	Buah	Baik
	- Mesin Hitung Elektronik/Calculator	1	Buah	Baik
	- Mesin Kas Register	6	Buah	Baik
	- Lemari Besi/Metal	25	Buah	Baik
	- Lemari Kayu	8	Buah	Baik
	- Rak Besi	46	Buah	Baik
	- Rak Kayu	1	Buah	Baik
	- Filing Cabinet Besi	73	Buah	Baik
	- Brandkas	2	Buah	Baik
	- Papan Visual/Papan Nama	287	Buah	Baik

	- Alat Penghancur Kertas	6	Buah	Baik
	- Mesin Absensi	12	Buah	Baik
	- Alat Kantor Lainnya	7	Buah	Baik
	- Meja Kerja Kayu	3	Buah	Baik
	- Sice	1	Buah	Baik
	- Meja Rapat	17	Buah	Baik
	- Meja Resepsionis	2	Buah	Baik
	- Meja 1/2 Biro	62	Buah	Baik
	- Meja Kantor	1	Buah	Baik
	- Meja Staff	3	Buah	Baik
	- Kursi Staff	3	Buah	Baik
	- Kursi Rapat	36	Buah	Baik
	- Kursi Rapat Hand Leg	10	Buah	Baik
	- Kursi Tamu	1	Buah	Baik
	- Kursi Putar	2	Buah	Baik
	- Bangku Tunggu	21	Buah	Baik
	- Meja Komputer	2	Buah	Baik
	- Sofa	11	Buah	Baik
	- Meubeleur lainnya	1	Buah	Baik
	- Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Buah	Baik
	- Mesin Pemotong Rumput	1	Buah	Baik
	- A.C. Window	36	Buah	Baik
	- A.C. Split	3	Buah	Baik
	- Televisi	3	Buah	Baik
	- Unit Power Supply	7	Buah	Baik
	- Camera Video	4	Buah	Baik
	- Tustel	8	Buah	Baik
	- Dispenser	2	Buah	Baik
	- Handy Cam	2	Buah	Baik
	- Karpets	1	Buah	Baik
	- Gordyin/Kray	5	Buah	Baik
	- Alat Pemanas Ruangan	1	Buah	Baik
	- DVD Player	1	Buah	Baik
	- Alat Rumah Tangga Lain-lain	9	Buah	Baik
	- Alat Pemadam/Portable	3	Buah	Baik
	- Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Buah	Baik
	- Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	Buah	Baik
	- Meja Kerja Pejabat Eselon IV	6	Buah	Baik
	- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	20	Buah	Baik
	- Meja Kerja Pejabat lain-lain	36	Buah	Baik
	- Meja Rapat Pejabat Eselon II	1	Buah	Baik
	- Meja Rapat Pejabat Eselon III	1	Buah	Baik
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Buah	Baik
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	Buah	Baik
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	6	Buah	Baik
	- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	20	Buah	Baik
	- Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	17	Buah	Baik
	- Lemari Buku Untuk Perpustakaan	2	Buah	Baik

	- Kalkulator	4	Buah	Baik
	- Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	4	Buah	Baik
	- UPS	2	Buah	Baik
6	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	52	Buah	Baik
	- Audio Amplifier	2	Buah	Baik
	- Intercom Unit	4	Buah	Baik
	- Audio Command Desk	1	Buah	Baik
	- peralatan studio audio lainnya (dst)	1	Buah	Baik
	- Camera Electronic	8	Buah	Baik
	- Tripod Camera	1	Buah	Baik
	- Slide Projector	1	Buah	Baik
	- Lensa Kamera	1	Buah	Baik
	- Layar Film/Projector	15	Buah	Baik
	- Mesin Cetak Elektronik	1	Buah	Baik
	- Mesin Kertas	12	Buah	Baik
	- Telephone (PABX)	1	Buah	Baik
	- Handy Talky (HT)	2	Buah	Baik
	- Facsimile	1	Buah	Baik
	- alat komunikasi radio ssb lainnya (dst)	1	Buah	Baik
7	ALAT LABORATORIUM	1	Buah	Baik
	- alat laboratorium mekanika tanah dan batuan lainnya (dst)	1	Buah	Baik

*Sumber: BPKPD TA 2023 (diolah)

1.4 Isu Aktual

Isu-isu penting berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu Strategis adalah keadaan atau kondisi yang harus mendapatkan perhatian atau prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah karena mempunyai dampak yang signifikan bagi daerah. Isu strategis mempunyai karakteristik antara lain penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKPD terdapat beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BPKPD pada tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

1. Adanya penggunaan sistem informasi baru untuk penganggaran tahun 2024 yaitu menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI);
2. Masih terdapat Barang Milik Daerah yang belum memiliki tanda bukti kepemilikan yang sah, berdasarkan data per Januari tahun 2023 terdapat 236 Bidang Tanah dan 476 Kendaraan yang belum memiliki bukti kepemilikan yang sah;
3. Belum optimalnya integrasi pengelolaan keuangan daerah, dimana sistem pengelolaan keuangan daerah tidak hanya digunakan dalam 1 (satu) aplikasi/sistem saja sehingga pelaksanaannya belum efektif dan efisien;
4. Masih terdapat objek pajak yang dapat dijadikan sebagai potensi peningkatan penerimaan pajak daerah namun belum tercatat;
5. Belum *update* nya regulasi tentang pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
6. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung di BPKPD, dimana terdapat beberapa sarana dan prasarana yang tidak dapat digunakan untuk menunjang kinerja .

Upaya yang dilakukan oleh BPKPD dalam menangani isu strategis pada tahun 2023 diantaranya :

1. Melakukan pembinaan penyusunan APBD tahun 2024 kepada Perangkat Daerah, Kecamatan dan BLUD;
2. Melakukan pensertifikatan terhadap tanah/bangunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

3. Menggunakan aplikasi pendamping SIPD yaitu dengan menggunakan SIMDA FMIS dalam penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah;
4. Melakukan pemuktahiran data pajak daerah melalui pendataan dan pendaftaran terhadap objek pajak daerah;
5. Melakukan penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Melakukan pengadaan sarana dan prasarana yaitu membuat ruang rapat, pembuatan aplikasi yang memudahkan pekerjaan serta belanja modal peralatan komputer.

1.5 Sistematika LKIP

Sistematika Penyajian LKIP Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada sistematika Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2016 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi. Pendahuluan berisi:

- A. Kedudukan Tugas Pokok dan fungsi
- B. Struktur Organisasi
- C. Aspek Kepegawaian
- D. Isu Aktual
- E. Sistematika Penyusunan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilkaukan organisasi ntuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN KERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama 5 (Lima) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya. Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah 2021-2026 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Jangka Pendek Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya untuk dapat mencapai visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, maka visi pembangunan daerah yang hendak dicapai dalam periode 2021–2026 adalah:

**“ DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI,
BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA”**

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. BPKPD selaku perangkat daerah yang memiliki tugas sebagai fungsi penunjang urusan keuangan mendukung pada misi ke-2 (dua) yaitu **Mewujudkan Pemerintahan Yang Melayani, Bersih, Dan Profesional**. Selanjutnya berdasarkan visi dan misi tersebut ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

2.2 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam dokumen Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda-agenda yang dituangkan dalam RPJMD secara otomatis menjadi beban kerja dan tanggungjawab perangkat daerah melalui rancangan program, kegiatan dan sub kegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya.

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi penunjang Pemerintahan khususnya Bidang Keuangan. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah tercantum pada misi kedua yaitu **Mewujudkan Pemerintahan Yang Melayani, Bersih, Dan Profesional**. Sedangkan tujuan jangka menengah yaitu **Meningkatnya Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel dan Berorientasi Pelayanan Prima** dengan indikator tujuan yaitu Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).

2.3 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berikut sasaran dan indikator

sasaran dari tujuan-tujuan strategis BPKPD Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan RENSTRA 2021-2026:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator sasaran;
 - Nilai reformasi birokrasi Perangkat Daerah.
2. Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel, dengan indikator sasaran;
 - Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Mewujudkan pengelolaan aset yang tertib dan akuntabel, dengan indikator sasaran;
 - Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan.
4. Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah, dengan indikator sasaran;
 - Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah.

Untuk lebih jelasnya target sasaran dan indikator sasaran dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1
Sasaran Strategis Jangka Menengah
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Tahun 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akutabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	N/A	N/A	65	69	73	77	81	81
2	Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	%	74	77	80	83	86	89	90	90
4	Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	%	-6,48	4,99	5,01	5,11	5,18	5,24	5,30	5,30

Sumber: Renstra BPKPD Tahun 2021-2026

2.4 Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun Indikator Kinerja Utama BPKPD berdasarkan RENSTRA BPKPD Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Tahun 2023
(Berdasarkan RENSTRA BPKPD Tahun 2021-2026)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Alasan	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akutabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	- Perpres 81 Tahun 2010 tentang <i>Grand Design</i> Reformasi Birokrasi 2010-2025; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.	Terdapat dua dimensi dalam Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi, yaitu dimensi RB General dan dimensi RB Tematik. Evaluasi pada RB General lebih memotret kemajuan reformasi birokrasi kementerian/lembaga/ pemerintah daerah berdasarkan pada upaya memperbaiki masalah hulu atau masalah-masalah umum yang terjadi di internal birokrasi dan terkadang dampaknya bersifat jangka menengah sampai panjang. Adapun Evaluasi RB Tematik lebih menekankan pada upaya yang bersifat terobosan atau inovasi dalam mengatasi berbagai masalah tata kelola yang terjadi pada tema-tema prioritas pembangunan. 1. Dimensi RB General Dimensi RB General terdiri dari dua (2) komponen yaitu komponen capaian strategi pelaksanaan RB General dan komponen capaian implementasi kebijakan reformasi birokrasi. a. Komponen Capaian Strategi Pelaksanaan RB General Strategi pelaksanaan RB General terdiri dari: i. sub komponen kualitas rencana aksi, serta ii. sub komponen implementasi rencana aksi.	- Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan; - Data kepegawaian; - SOP; - IKM; - Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; - SK Kepala Badan.

					b. Komponen Capaian Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Capaian implementasi kebijakan reformasi birokrasi diukur dengan beberapa indikator. 2. Dimensi RB Tematik Evaluasi pelaksanaan RB Tematik difokuskan pada penilaian dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan merupakan hasil dari perbaikan tata kelola pada tema-tema prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.	
2	Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; - Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;	- Paling lambat 31 Desember - (dokumen pelaporan yang diserahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan/(dokumen pelaporan yang harus diserahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan)x 100%) - (dokumen realisasi belanja yang sesuai peraturan dan perundangan /dokumen realisasi belanja yang diterbitkan x 100%)	- Penetapan Perda APBD - Dokumen laporan keuangan - Peraturan Perundangan dan dokumen realisasi belanja yang diterbitkan

				Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.		
3	Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	%	Berdasarkan Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Standar Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah tanah dan kendaraan yang dimiliki dibagi jumlah sertifikat dan BPKB	Hasil penilaian pengelolaan BMD
4	Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	%	Berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	$((\text{Realisasi Pajak Daerah Tahun } n - \text{Realisasi Pajak Daerah Tahun } (n-1)) / (\text{Realisasi Pajak Daerah Tahun } (n-1)) \times 100\%)$	LRA tahun n dan (n-1)

Sumber: IKU BPKPD Tahun 2021-2026 (revisi tahun 2023)

2.5 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra dan dilaksanakan secara tahunan.

Tabel 2.3
Perubahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Tahun 2023
(Berdasarkan RENSTRA BPKPD Tahun 2021-2026)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akutabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Perangkat Daerah	Birokrasi	Nilai	69
2	Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Rata-rata penetapan APBD waktu; laporan keuangan dan penatausahaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	persentase yang tepat keuangan pelayanan keuangan dengan perundang-	%	100
3	Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan		%	83
4	Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah		%	5,11

Sumber: Renstra BPKPD Tahun 2021-2026

2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Program dan kegiatan yang tertulis pada Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja Perangkat Daerah, yang merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Penetapan kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting dan perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 mengacu pada RENSTRA BPKPD Tahun 2021-2026, Rencana Kinerja Tahun 2023, Indikator Kinerja Tahun 2023 dan DPA BPKPD Tahun 2023. Sedangkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 mengacu pada RENSTRA BPKPD Tahun 2021-2026, Rencana Kinerja Perubahan Tahun 2023 dan DPPA BPKPD Tahun 2023. Berikut adalah perjanjian kinerja

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akutabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	69
2	Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Rata-rata penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%
3	Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	83%
4	Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	5,11%

Sumber: Renstra BPKPD Tahun 2021-2026

Anggaran Belanja Tahun 2023 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah yang dialokasikan untuk pencapaian setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Anggaran Belanja per Sasaran Strategis
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp.)	% Anggaran
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akutabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	104.503.039.652,00	12,91
2	Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	701.570.365.391,00	86,64
3	Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	624.000.000,00	0,08
4	Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	3.031.061.000,00	0,37
TOTAL			809.728.466.043,00	100

Sumber: BPKPD TA. 2023 (diolah)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Capaian kinerja didasarkan pada hasil pengukuran kinerja untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran beserta indikator yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan perangkat daerah dan Visi Misi Pemerintah Daerah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 bertujuan untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis BPKPD tahun 2021-2026, dan dituangkan lebih lanjut pada Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Kerja tahun 2023, serta Perjanjian Kinerja dan Perubahan Kinerja Tahun 2023.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Adapun cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin kurang baik. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja 1

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan, sebagai berikut :

Tabel 3.2
Skala Nilai Peringkat Kinerja 2

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode Warna
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi	
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi	
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang	
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah	
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah	

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada perjanjian kinerja yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja dengan melakukan pengumpulan data kinerja dalam rangka mengukur dan mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran organisasi. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, BPKPD menetapkan 4 (empat) sasaran dengan 4 (empat) indikator sasaran yang didukung oleh 4 program, 12 kegiatan dan 54 sub kegiatan, dengan anggaran total sebesar Rp. 809.728.466.043,00 dan terealisasi sebesar Rp. 732.327.095.840,00 maka persentase realisasi anggaran adalah 90,44%. Berikut pengukuran Kinerja dan analisis capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan Renstra Tahun 2021-2026 :

Tabel 3.3

Capaian Indikator Kinerja BPKPD Kab. Tasikmalaya Tahun 2023
(berdasarkan Renstra BPKPD Tahun 2021 – 2026)

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Sasaran Strategis 1 :					
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah					
1.1	Nilai reformasi birokrasi perangkat daerah	Nilai	69	78,07	113,14
Rata Rata Pencapaian Sasaran					113,14
Sasaran Strategis 2 :					
Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel					
2.1	Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	100	100	100
Rata Rata Pencapaian Sasaran					100
Sasaran Strategis 3 :					
Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel					
3.1	Persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan	%	83	84,68	102,02
Rata Rata Pencapaian Sasaran					102,02
Sasaran Strategis 4 :					
Meningkatnya pertumbuhan pajak daerah					
4.1	Persentase pertumbuhan pajak daerah	%	5,11	4,08	79,84
Rata Rata Pencapaian Sasaran					79,84
Rata Rata Pencapaian Per Sasaran					98,75

*Sumber: BPKPD TA 2023 (Data Sementara, Unaudited serta diolah) per 11 Januari 2024

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Rata-rata capaian kinerja BPKPD Tahun 2023 menunjukkan capaian yang baik dengan persentase sebesar 98,75 %. Selain capaian kinerja sasaran, BPKPD juga melakukan pengukuran capaian terhadap tujuan BPKPD. Berikut capaian Kinerja Indikator Tujuan BPKPD Tahun 2023:

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Indikator Tujuan
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Tahun 2023	
				Target	Realisasi
1	Meningkatnya tata kelola keuangan yang akuntabel dan berorientasi pelayanan prima	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	78,019	70,144

Sumber: Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui badan penelitian dan pengembangan daerah Provinsi melakukan pengukuran IPKD kabupaten/kota. Pengukuran IPKD dilakukan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, pelaksanaan, penyerapan anggaran dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD 1 (satu) tahun sebelum tahun berjalan. Penilaian IPKD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 900/Kep.487-BP2D/2021 Tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat Tahun 2018, 2019, dan 2020.

Pada tahun 2018 Kab. Tasikmalaya berada di peringkat ke-9 dengan indeks 58,40 (Kategori Perlu Perbaikan). Pada tahun 2019 Kab. Tasikmalaya berada di peringkat ke-7 dengan indeks 59,06 (Kategori Perlu Perbaikan). Dan untuk tahun 2020 nilai IPKD Kab. Tasikmalaya 66,489 (Kategori Perlu Perbaikan) berada di peringkat ke-6.

Pengukuran IPKD yang dilakukan pada tahun 2022 yaitu untuk pengelolaan keuangan daerah tahun 2021. Nilai IPKD Kabupaten Tasikmalaya mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dengan indeks 78,018 (Kategori Baik). Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 900/Kep.714-Bp2d/2022 Tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat Tahun Anggaran 2021, memperoleh peringkat ke 3 dari 18 Kabupaten se Provinsi Jawa Barat.

Namun pada tahun 2023 (penilaian atas laporan keuangan tahun 2022) mengalami penurunan yaitu mendapatkan nilai sebesar 70,144 (perlu perbaikan). Apabila dibandingkan dengan target tahun 2022 maka capaian kinerja yang diperoleh yaitu sebesar 89,91% dari Target 78,019. Target tersebut merupakan target penyesuaian, karena berdasarkan hasil penilaian IPKD pada tahun 2022 telah melampaui target akhir renstra. Dimana nilai IPKD tahun 2022 yaitu sebesar 78,018 dan nilai tersebut telah melampaui target akhir renstra yang ditargetkan tercapai sebesar 71,50. Hasil penilaian IPKD yang diperoleh pada tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.5
Hasil Penilaian IPKD Tahun 2023
 (atas Laporan Keuangan Tahun 2022)

Dimensi	Nomor	Indikator	Nilai	Penjelasan
1	D.1.1	Kesesuaian Nomenkelatur Program RPJMD dan RKPD	0,68	Sebanyak 140 program dimana 95 program berstatus sesuai dan 45 program berstatus tidak sesuai. Maka 32,1 % tidak sesuai dan 67,9% telah sesuai
	D.1.2	Kesesuaian Nomenkelatur Program RKPD dan KUAPPAS	0,83	sebanyak 417 program dimana 347 program berstatus sesuai dan 70 program berstatus tidak sesuai. Maka 16,8% tidak sesuai dan 83,2% sesuai
	D.1.3	Kesesuaian Nomenkelatur Program KUAPPAS dan APBD	0,81	sebanyak 362 program dimana 294 program berstatus sesuai dan 68 program berstatus tidak sesuai. Maka 18,8% tidak sesuai dan 81,2% sesuai
	D.1.4	Kesesuaian Pagu Program RKPD dan KUAPPAS	0,41	sebanyak 417 program dimana 170 program berstatus sesuai dan 247 program berstatus tidak sesuai. Maka 59,2% tidak sesuai dan 40,8% sesuai
	D.1.5	Kesesuaian Pagu Program KUAPPAS dan APBD	0,45	sebanyak 421 program dimana 190 program berstatus sesuai dan 231 program berstatus tidak sesuai. Maka 54,9% tidak sesuai dan 45,1% sesuai
Total Nilai Dimensi 1 (skor rata-rata x nilai maksimal)			9,5455	Nilai Maksimal 15
2	D.2.1	Alokasi jumlah belanja untuk fungsi pendidikan sebesar minimal 20% dari APBD	1,00	belanja untuk fungsi pendidikan telah dialokasikan sebesar 35,66% dari APBD
	D.2.2	Alokasi jumlah belanja untuk urusan kesehatan sebesar minimal 10% dari APBD di luar gaji	1,00	belanja untuk urusan kesehatan telah dialokasikan sebesar 20,10% dari APBD di luar gaji
	D.2.3	Alokasi jumlah belanja untuk infrastruktur yang langsung dalam alokasi dana transfer sebesar minimal 25% dari Dana Transfer Umum	0,00	Pada tahun 2022 Kabupaten Tasikmalaya telah mengalokasikan belanja untuk infrastruktur yang bersumber dari Dana Transfer Umum sebesar 25,46% yang terdiri dari Belanja Modal, Belanja Pemeliharaan, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan serta Belanja Gaji Guru Non PNS/Guru PPPK. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus. Namun pada penginputan di Sistem IPKD Belanja Gaji Guru Non PNS/Guru PPPK tidak dijadikan bahan perhitungan alokasi belanja sehingga hanya tercatat sebesar 18,83%. Dimana angka tersebut dibawah besaran minimal yang telah ditentukan, maka skor yang didapat yaitu 0.

Dimensi	Nomor	Indikator	Nilai	Penjelasan
	D.2.4	Alokasi jumlah belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal	0,86	Terdapat 4 SPM yang tidak dialokasikan pada tahun 2022 diantaranya pelayanan kesehatan bayi baru lahir, penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota, Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Pelayanan informasi rawan bencana
Total Nilai Dimensi 2 (skor rata-rata x nilai maksimal)			14,3103	Nilai Maksimal 20
3	D.3.1	Informasi Ringkasan Dokumen RKPD	1,00	Dokumen telah di upload dengan tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak
	D.3.2	Informasi Kebijakan Umum Anggaran	1,00	Dokumen telah di upload dengan tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak
	D.3.3	Informasi Ringkasan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran	1,00	Dokumen telah di upload dengan tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak
	D.3.4	Informasi Ringkasan Dokumen RKA SKPD	1,00	Dokumen telah di upload dengan tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak
	D.3.5	Informasi Ringkasan Dokumen RKA PPKD	1,00	Dokumen telah di upload dengan tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak
	D.3.6	Informasi Ringkasan Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	1,00	Dokumen telah di upload dengan tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak
	D.3.7	Informasi Peraturan Daerah tentang APBD	1,00	Dokumen telah di upload dengan tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak
	D.3.8	Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1,00	Dokumen telah di upload dengan tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak
	D.3.9	Informasi Ringkasan DPA SKPD	1,00	Dokumen telah di upload dengan tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak
	D.3.10	Informasi DPA PPKD	1,00	Dokumen telah di upload dengan tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak
	D.3.11	Informasi Realisasi Pendapatan Daerah	1,00	Dokumen telah di upload dengan tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak
	D.3.12	Informasi Realisasi Belanja Daerah	1,00	Dokumen telah di upload dengan tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak
	D.3.13	Informasi Realisasi Pembiayaan Daerah	1,00	Dokumen telah di upload dengan tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak
	D.3.14	Informasi Ringkasan Dokumen Rancangan Perubahan APBD	1,00	Dokumen telah di upload dengan tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak

Dimensi	Nomor	Indikator	Nilai	Penjelasan
	D.3.15	Informasi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	1,00	Dokumen telah di upload dengan tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak
	D.3.16	Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1,00	Dokumen telah di upload dengan tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak
	D.3.17	Informasi Ringkasan RKA Perubahan	1,00	Dokumen telah di upload dengan tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak
	D.3.18	Informasi Umum Pengadaan	0,50	Dokumen telah di upload dengan tepat waktu namun tidak dapat diakses
	D.3.19	Informasi SK Kepala Daerah tentangn Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	1,00	Dokumen telah di upload dengan tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak
	D.3.20	Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi	1,00	Dokumen telah di upload dengan tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak
	D.3.21	Informasi Laporan Arus Kas	1,00	Dokumen telah di upload dengan tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak
	D.3.22	Informasi Laporan Realisasi Anggaran Seluruh SKPD	0,50	Dokumen telah di upload dengan tepat waktu namun tidak dapat diakses
	D.3.23	Informasi Laporan Realisasi Anggaran PPKD	0,50	Dokumen telah di upload dengan tepat waktu namun tidak dapat diakses
	D.3.24	Informasi Neraca	1,00	Dokumen telah di upload dengan tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak
	D.3.25	Informasi CaLK Pemerintah Daerah	1,00	Dokumen telah di upload dengan tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak
	D.3.26	Informasi Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah	1,00	Dokumen telah di upload dengan tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak
	D.3.27	Informasi Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah	1,00	Dokumen telah di upload dengan tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak
	D.3.28	Informasi Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1,00	Dokumen telah di upload dengan tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak
	D.3.29	Informasi Opini BPK	1,00	Dokumen telah di upload dengan tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak
Total Nilai Dimensi 3 (skor rata-rata x nilai maksimal)			14,2241	Nilai Maksimal 15
4	D.4.1	Penyerapan Anggaran Belanja Operasional	1,00	Penyerapan anggaran belanja operasional sebesar 91,61% dimana penerapan tersebut diatas 80% maka diberi skor 1

Dimensi	Nomor	Indikator	Nilai	Penjelasan
	D.4.2	Penyerapan Anggaran Belanja Modal	1,00	Penyerapan anggaran belanja modal sebesar 84,75% dimana penerapan tersebut diatas 80% maka diberi skor 1
	D.4.3	Penyerapan Anggaran Belanja Tidak Terduga	0,00	Penyerapan anggaran belanja tidak terduga sebesar 44,63% dimana penerapan tersebut dibawah 80% maka diberi skor 0
	D.4.3	Penyerapan Anggaran Belanja Transfer	1,00	Penyerapan anggaran belanja transfer sebesar 99,60% dimana penerapan tersebut diatas 80% maka diberi skor 1
Total Nilai Dimensi 4 (skor rata-rata x nilai maksimal)			15,000	Nilai Maksimal 20
5	D.5.1	Kemandirian Keuangan	0,095	didapat dari total PAD dibandingkan dengan total pendapatan
	D.5.2	Fleksibilitas Keuangan	0,540	didapat dari total pendapatan dikurangi DAK dibagi total kewajiban ditambah belanja pegawai
	D.5.3	Solvabilitas Operasional	0,087	didapat dari total pendapatan LO dikurangi pendapatan DAK LO dibagi total beban LO
	D.5.4	Solvabilitas Jangka Pendek	0,002	didapat dari kas dan setara kas ditambah investasi jangka pendek dibagi kewajiban lancar
	D.5.5	Solvabilitas Jangka Panjang	0,093	didapat dari total aset tetap dibagi kewajiban jangka panjang
	D.5.6	Solvabilitas Layanan	0,008	didapat dari total aset tetap dibagi jumlah penduduk
Total Nilai Dimensi 5 (skor rata-rata x nilai maksimal)			2,0637	Nilai Maksimal 15
Dimensi 6	D.6.1	Opini Badan Pemeriksaan Keuangan	15,00	Kabupaten Tasikmalaya telah memperoleh opini WTP 4 tahun terakhir seccara berturut turut sehingga mendapatkan nilai maksimal pada dimensi 6 yaitu 15 poin
Total Nilai Dimensi 6 (skor rata-rata x nilai maksimal)			15,00	Nilai Maksimal 15
Total IPKD			70,1436	

Pada tahun 2023 IPKD ditargetkan sebesar 78,019 namun pada realisasinya hanya tercapai sebesar 70,144. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa dimensi dari IPKD yang belum optimal diantaranya;

1. Masih terdapat ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran;
2. Pada tahun 2022 Kabupaten Tasikmalaya telah mengalokasikan belanja untuk infrastruktur yang bersumber dari Dana Transfer Umum sebesar 25,46% yang terdiri dari Belanja Modal, Belanja Pemeliharaan, Belanja

Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan serta Belanja Gaji Guru Non PNS/Guru PPPK. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus. Namun pada penginputan di Sistem IPKD Belanja Gaji Guru Non PNS/Guru PPPK tidak dijadikan bahan perhitungan alokasi belanja sehingga hanya tercatat sebesar 18,83%. Dimana angka tersebut dibawah besaran minimal yang telah ditentukan, maka skor yang didapat yaitu 0. Sehingga mengurangi perolehan nilai pada dimensi 2;

3. Terdapat 3 dokumen dari 29 dokumen yang sudah diupload pada website Kabupaten Tasikmalaya yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari transparansi, namun dari hasil penilaian 3 dokumen tersebut tidak dapat diakses sehingga tidak menjadi nilai tambah pada penilaian IPKD;
4. Terdapat penyerapan anggaran yang masih dibawah 80% yaitu pada penyerapan anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT);
5. Kondisi keuangan daerah yang masih rendah karena masih bergantung kepada transfer pusat dan provinsi.

Dari penjelasan diatas maka hal yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Tasikmalaya, adalah :

1. Melakukan koordinasi yang intens dengan pihak terkait dalam penilaian IPKD diantaranya Bappelitbangda (dalam hal perencanaan anggaran), Dishubkominfo (dalam hal transparansi) dan Inspektorat Daerah (dalam hal opini BPK) serta Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Tasikmalaya (dalam hal penyerapan anggaran);
2. Mengalokasikan anggaran sesuai dengan mandat peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan melakukan inovasi-inovasi.

Diharapkan untuk kedepannya pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Tasikmalaya dapat menjadi lebih baik dengan menghadapi tantangan yang semakin sulit dan peraturan yang dinamis.



3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.6
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	69	78,07	113,14
2	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Rata-rata persentase penetapan APBD tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	%	100	100	100
3	Mewujudkan Pengelolaan Aset Daerah yang Tertib dan Akuntabel	Persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan	%	83	84,68	102,02
4	Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	%	5,11	4,08	79,84

*Sumber: BPKPD TA 2023 (Data Sementara, *Unaudited* serta diolah) per 11 Januari 2024

a. Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Evaluasi Reformasi Birokrasi adalah serangkaian aktivitas pengambilan informasi, analisis, dan pemberian nilai dengan tujuan untuk mengukur kemajuan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi serta memberikan rekomendasi perbaikan yang berkelanjutan. Terdapat perubahan aturan dalam penilaian Reformasi Birokrasi yang sebelumnya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Untuk tahun 2023 penilaian tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Oleh karena itu, Penilaian yang dilakukan sangat berbeda dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada penilaian tahun sebelumnya terdapat 8 (delapan) area perubahan yang dilakukan yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Sedangkan untuk penilaian pada tahun 2023 terdapat dua jenis Evaluasi Reformasi Birokrasi, yaitu Evaluasi Internal dan Evaluasi Eksternal. Ruang lingkup Evaluasi Internal adalah pada evaluasi tahap perencanaan (*ex-ante*) dan evaluasi tahap pelaksanaan (*on-going*). Adapun Evaluasi Eksternal dilakukan untuk melihat hasil/dampak dari pelaksanaan reformasi birokrasi (*ex-post*). Terdapat dua dimensi dalam Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi, yaitu dimensi RB General dan dimensi RB Tematik.

RB General adalah upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang berfokus pada penyelesaian permasalahan hulu terkait masalah umum birokrasi melalui berbagai kebijakan kementerian/lembaga di tingkat meso. Dimensi RB General

terdiri dari dua (2) komponen yaitu komponen capaian strategi pelaksanaan RB General dan komponen capaian implementasi kebijakan reformasi birokrasi.

1. Komponen Capaian Strategi Pelaksanaan RB General
Strategi pelaksanaan RB General terdiri dari: i. sub komponen kualitas rencana aksi, serta ii. sub komponen implementasi rencana aksi;
2. Komponen Capaian Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi
Capaian implementasi kebijakan reformasi birokrasi diukur dengan beberapa indikator.

RB Tematik adalah upaya percepatan pencapaian dampak berbagai agenda prioritas pembangunan nasional dengan mengurai dan menjawab untuk mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) berbagai permasalahan hilir tata kelola yang terkait tema yang sudah ditetapkan oleh tingkat makro. Dimensi RB Tematik Evaluasi pelaksanaan RB Tematik difokuskan pada penilaian dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan merupakan hasil dari perbaikan tata kelola pada tema-tema prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

Nilai Reformasi Birokrasi BPKPD pada tahun 2023 ditargetkan dapat tercapai sebesar 69. Hasil penilaian Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Tim Asesor Kabupaten Tasikmalaya dan Tim Independen Provinsi Jawa Barat yaitu untuk RB General diperoleh sebesar 27,97 dari nilai maksimal 35 dan RB Tematik sebesar 50,10 dari nilai maksimal 65 sehingga total nilai yang diperoleh sebesar 78,07 atau dengan kategori “BB”. Hasil tersebut melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya, maka capaian kinerja yang diperoleh yaitu 113,14%. Diharapkan untuk kedepannya dapat Meningkatkan prestasi yang telah diraih melalui optimalisasi kinerja dengan melakukan berbagai inovasi.

b. Rata-rata persentase penetapan APBD tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Indikator ini terdiri dari 3 sub indikator, yaitu :

- 1) Penetapan APBD tepat waktu;
- 2) Laporan Keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan; dan
- 3) Pelayanan penatausahaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 telah dilaksanakan tepat waktu. Penetapan APBD telah dilakukan tepat waktu yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 bahwa penetapan APBD paling lambat akhir Desember (31 Desember). Kabupaten Tasikmalaya telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada tanggal 29 Desember 2023. Sehingga capaian sub indikator penetapan APBD tepat waktu adalah 100%.

Pelaporan keuangan yang diserahkan antara lain Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Bulanan sebanyak 12 dokumen, LRA Triwulanan sebanyak 4 dokumen, LRA Semesteran 1 dokumen dan LKPD *Audited* Tahun 2022 sebanyak 1 dokumen. Dokumen pelaporan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan anatara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sehingga capaian sub indikator laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan memiliki capaian 100%

Perhitungan realisasi belanja daerah berdasarkan jumlah dokumen realisasi belanja yang sesuai peraturan perundang-undangan dibagi jumlah dokumen realisasi belanja yang diterbitkan. Pada tahun 2023, jumlah dokumen realisasi belanja jumlah dokumen realisasi belanja sebanyak 72 dokumen terdiri dari dokumen belanja operasional gaji dan tunjangan 12 dokumen, dokumen belanja bansos 12 dokumen, dokumen belanja hibah 12 dokumen, dokumen belanja operasional lainnya 12 dokumen, dokumen belanja transfer 12 dokumen dan dokumen belanja tidak terduga 12 dokumen. Dan dokumen-dokumen tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga capaian sub indikator pelayanan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah 100%.

Berdasarkan data diatas rata-rata realisasi indikator persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah 100%.

c. Persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan

Berdasarkan data per tanggal 29 Desember 2023 Jumlah bidang tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya 683 bidang dari yang semula per tanggal 30 Desember 2022 sebanyak 741 bidang tanah. Perubahan data tanah tersebut dikarenakan terdapat pematangan bidang tanah yang

dikapitalisasi ke induknya, terdapat *double* catat, terdapat bidang tanah yang sudah diserahkan kepada pemerintah Kota Tasikmalaya, bidang tanah yang merupakan HGU, bidang tanah pematangan pembangunan Alun-alun Cikatomas, bidang tanah yang merupakan tanah Desa, bidang tanah yang dihibahkan dan diwakafkan serta terdapat temuan bidang tanah yang baru.

Untuk kendaraan data per 30 Desember 2022, Kabupaten Tasikmalaya memiliki 3.195 unit kendaraan sedangkan per 29 Desember 2023 terdapat 3205 kendaraan. Perubahan data kendaraan tersebut karena penambahan kendaraan pada tahun 2023 sebanyak 13 unit diantaranya roda dua sebanyak 8 unit dan roda empat/enam sebanyak 5 unit serta pada tahun 2022 terdapat pengadaan 2 unit kendaraan roda empat yang tidak jadi direalisasikan dan juga terdapat *double* catat yang seharusnya hanya 1 unit kendaraan yaitu pada kendaraan perpustakaan keliling yang dikaroserikan/dimodifikasi sesuai kebutuhan, selain itu pada tahun 2023 terdapat penambahan kendaraan, diantaranya adanya hibah dari BPBD sebanyak 2 unit, terdapat koreksi data kendaraan dimana terdapat kendaraan roda 3 sebanyak 24 unit belum masuk dalam daftar kendaraan yang diperhitungkan serta penambahan *dumtruck* sebanyak 9 unit yang sebelumnya masuk ke dalam kategori alat berat. Dari penambahan dan koreksi data tersebut maka total kendaraan milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 3.240 unit.

Pada awal penyusunan target, direncanakan akan melakukan pensertifikatan 100 bidang tanah per tahun. Pada tahun 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya melakukan pensertifikatan kepada 4 ruas jalan yang menghasilkan 125 sertipikat sedangkan bangunan 3 sekolah menghasilkan 1 sertipikat dan juga ditemukan 2 bidang tanah yang telah bersertifikat. Sehingga total penambahan bidang tanah/bangunan yang bersertifikat pada tahun 2023 yaitu 9 bidang tanah.

Berdasarkan data per Desember tahun 2023 sebanyak 2.856 unit kendaraan telah memiliki bukti kepemilikan yang sah. Pada Tahun 2023 terdapat penyerahan 5 BPKP dari Dinas Pariwisata, 12 dari Satpol PP dan 40 dari Dinas Kesehatan, sedangkan untuk 70 BPKB merupakan hasil koreksian Bidang Aset yang pada tahun sebelumnya belum tercatat pada KIB. Sedangkan Bidang tanah yang telah memiliki bukti kepemilikan yang sah berjumlah 466 bidang. Sehingga jumlah aset (tanah dan kendaraan) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada sebanyak 3.923 dan yang telah memiliki kepemilikan yang sah sebanyak 3.322 atau sebesar 84,68% sedangkan target persentase aset yang memiliki bukti kepemilikan yang sah pada Tahun 2023 sebesar 83%, maka capaian kinerja untuk sasaran mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel yaitu 102,02%.

d. Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah

Target penerimaan pajak daerah Kabupaten Tasikmalaya Pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp 102.450.000.000,00, berdasarkan LRA *Preliminary* per tanggal 11 Januari 2024 realisasi yang diterima dari pajak daerah tersebut sebesar 95,86% atau Rp. 98.204.091.024,00. Hal tersebut dikarenakan dari 9 jenis pajak, hanya 3 jenis pajak melampaui target sedangkan 6 jenis pajak tidak melampaui target yang telah ditetapkan. Untuk 3 jenis pajak yang melampaui target diantaranya Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan. Sedangkan untuk 6 jenis pajak yang tidak melampaui target pajak diantaranya Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak daerah tahun sebelumnya, realisasi tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,08%. Dari realisasi sebesar

Rp. 94.355.650.449,00 Pada Tahun 2022 meningkat menjadi Rp. 98.204.091.024,00 pada tahun 2023. Meskipun mengalami pertumbuhan pajak, akan tetapi tidak mencapai target pertumbuhan pajak yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila dilihat dari target pertumbuhan pajak tahun 2023 sebesar 5,11% sedangkan yang terealisasi hanya 4,08% sehingga persentase ketercapaian memperoleh 79,84% hasil capaian kinerja tersebut dihitung dari $((\frac{4,08}{5,11} \times 100) = 79,84\%)$.

Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan optimalisasi pendapatan daerah khususnya pajak daerah yaitu pemasangan *Tappingbox* (alat perekam data transaksi), penggunaan *SMS Gateway*, Pendataan Objek Bangunan PBB Perdesaan dan Perkotaan, melakukan monitoring PBB serta peningkatan pelayanan pajak daerah.



3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.7
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2021 dan tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	% Capaian	Target Akhir Renstra (2026)	Capaian Realisasi Tahun 2023 terhadap target akhir Renstra (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	61,36	78,07	113,14	81	96,38
2.	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Rata-rata persentase penetapan APBD tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan	100%	100%	100%	100	100%	100

	perundang-undangan yang berlaku							
3.	Mewujudkan Pengelolaan Aset Daerah yang Tertib dan Akuntabel	Persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan	77,98%	80,77%	84,68	102,02	90%	94,09
4.	Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah*	8,14%	25,21%	4,08%	79,84	5,30%	76,98

*Sumber: BPKPD TA 2023 (Data Preliminary serta diolah) per 11 Januari 2024

a. Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Indikator sasaran Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akutabilitas Kinerja Perangkat Daerah di tahun 2021 tidak ditargetkan, pada tahun tersebut belum dilakukan penilaian oleh instansi terkait yang berwenang, hal ini disebabkan belum siapnya aturan pendukung untuk menilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Penilaian RB Perangkat Daerah di Kabupaten Tasikmalaya Mulai dilakukan pada tahun 2022 dengan terbitnya Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2022 tentang Sistem Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Penilaian RB dilakukan oleh Tim Penilai Independen dari Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Tim Independen dari Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh tim Penilai Internal dan tim Independen, Nilai RB BPKPD pada tahun 2022 terealisasi sebesar 61,36 "cukup baik" namun berdasarkan capaian kinerja hanya tercapai 94,4% dari target yang telah ditetapkan dengan nilai 65. Untuk penilaian RB Tahun 2023 Terdapat perubahan aturan yang sebelumnya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi kemudian dirubah

oleh pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.

Nilai Reformasi Birokrasi BPKPD pada tahun 2023 ditargetkan dapat tercapai sebesar 69. Berdasarkan Hasil penilaian Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Tim Asesor Kabupaten Tasikmalaya dan Tim Independen Provinsi Jawa Barat nilai RB BPKPD Tahun 2023 adalah 78,07 Dengan Kategori Baik. Meskipun ada kendala dalam persiapan penilaian RB di tahun 2023 karena penilaian yang dilakukan sangat berbeda dengan tahun sebelumnya namun BPKPD dapat meningkatkan nilai RB dari tahun sebelumnya, bahkan melebihi dari target yang ditetapkan. jika dibandingkan dengan target akhir renstra dengan nilai 81 maka capaian realisasi sampai tahun ketiga renstra sudah terealisasi 96,38%.

b. Rata-rata persentase penetapan APBD tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Capaian indikator kinerja ini konsisten setiap tahunnya dengan capaian 100% atau memenuhi target dari target yang telah ditetapkan. Berdasarkan data capaian kinerja untuk indikator Rata-rata persentase penetapan APBD tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah mencapai 100% sejak tahun pertama Renstra yaitu pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra, persentase capaian tahun 2023 adalah 100%.

c. **Persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan**

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Indikator Persentase Barang Milik Daerah yang Telah Dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023

<i>Uraian BMD</i>	<i>Tahun 2021</i>	<i>Tahun 2022</i>	<i>Tahun 2023</i>
<i>Jumlah Kendaraan</i>	3.170 unit	3.195 unit	3.240 unit
<i>Jumlah Bidang Tanah</i>	771 bidang	741 bidang	683 bidang
Total	3.941	3.936	3.923
	unit/bidang	unit/bidang	unit/bidang
<i>Jumlah Kendaraan yang Telah Memiliki Bukti Kepemilikan</i>	2.681 unit	2.719 unit	2.856 unit
<i>Jumlah Bidang Tanah yang Telah Memiliki Bukti Kepemilikan</i>	392 bidang	460 bidang	466 bidang
Total	3.073	3.179	3.322
	unit/bidang	unit/bidang	unit/bidang
Capaian	79,98%	80,77%	84,68%

Sumber: BPKPD TA. 2023, diolah

Berdasarkan data per tanggal 29 Desember 2023 Jumlah bidang tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya 683 bidang dari yang semula per tanggal 30 Desember 2022 sebanyak 741 bidang tanah. Pada triwulan I terdapat pengurangan sebanyak 67 bidang tanah dari 741 bidang tanah menjadi 674 bidang tanah. Perubahan data tanah tersebut dikarenakan terdapat pematangan bidang tanah yang dikapitalisasi ke induknya, terdapat *double* catat, terdapat bidang tanah yang sudah diserahkan kepada pemerintah Kota Tasikmalaya, bidang tanah yang dihibahkan dan diwakafkan serta terdapat temuan bidang tanah yang baru. Sedangkan yang sudah bersertifikat sebanyak 438 bidang tanah.

Pada triwulan II terdapat perubahan data jumlah bidang tanah hasil dari pemeriksaan BPK RI yang semula sebanyak 674 bidang tanah menjadi 695 bidang tanah. Dari total bidang tanah tersebut sebanyak 457 bidang tanah telah bersertifikat. Jumlah bidang tanah bertambah sebanyak 21 bidang tanah yang berasal dari pematangan alun-alun Cikatomas, Pembangunan Alun-alun Cikatomas dan Pematangan Lapangan Doser sebanyak 3 bidang tanah, 2 bidang tanah merupakan Hak Guna Usaha (HGU), 4 bidang tanah merupakan tanah pengangonan serta 12 bidang tanah diindikasikan merupakan tanah Desa.

Pada triwulan IV terdapat koreksi dari pihak BPN dan temuan di lapangan dimana 12 bidang tanah dikeluarkan, diantaranya 4 bidang tanah merupakan tanah pengangonan, 2 bidang tanah HGU, 5 bidang tanah Desa dan 1 bidang tanah karena *double* catat sehingga total tanah milik Pemerintah Daerah yaitu 683 bidang. Selain itu terdapat penambahan bidang tanah yang telah bersertifikat pada tahun 2023 yaitu 7 bidang diantaranya 4 ruas jalan dan 3 bangunan sekolah dimana dari 4 ruas jalan tersebut menghasilkan 125 sertipikat sedangkan untuk bangunan sekolah 1 sertipikat dan juga ditemukan 2 bidang tanah yang telah bersertipikat. Sehingga total bidang tanah yang telah bersertifikat sampai dengan tahun 2023 yaitu 466 bidang.

Berdasarkan data jumlah kendaraan pada 30 Desember 2022, Kabupaten Tasikmalaya memiliki 3.195 unit kendaraan sedangkan per 29 Desember 2023 terdapat 3.205 kendaraan. Sehingga terdapat penambahan sebanyak 10 kendaraan. Perubahan data kendaraan tersebut karena pada tahun 2022 terdapat 2 unit yang tidak jadi direalisasikan dan terdapat *double* catat yang seharusnya hanya 1 unit kendaraan serta adanya penambahan kendaraan pada tahun 2023 sebanyak 13 unit diantaranya roda dua sebanyak 8 unit dan roda empat/enam sebanyak 5 unit. Selain itu adanya hibah dari BPBD sebanyak 2 unit serta terdapat koreksi data kendaraan dimana terdapat

kendaraan roda 3 sebanyak 24 unit belum masuk dalam daftar kendaraan yang diperhitungkan dan penambahan dumtruck sebanyak 9 unit yang sebelumnya masuk ke dalam kategori alat berat. Dari penambahan dan koreksi data tersebut sehingga jumlah total kendaran milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 3.240 unit.

Dari jumlah total kendaran milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 3.240 unit, sebanyak 2.856 unit kendaraan telah memiliki bukti kepemilikan yang sah, Sedangkan Bidang tanah yang telah memiliki bukti kepemilikan yang sah sampai dengan Desember 2023 yaitu 466 bidang.

Berdasarkan data diatas jumlah aset (tanah dan kendaraan) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya per 30 Desember 2023 sebanyak 3.923 dan yang telah memiliki kepemilikan yang sah sebanyak 3.322. Sehingga persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi dengan bukti kepemilikan sebesar 84,68% atau capaian kinerja untuk sasaran mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel adalah sebesar 102,02% dari target 2023 sebesar 83%.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat peningkatan Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan yang sah dari 80,77% menjadi 84,68%, apabila dibandingkan dengan target akhir renstra maka sampai Tahun ketiga Renstra telah mencapai 94,09%.

d. Persentase pertumbuhan pajak daerah

Penerimaan pajak daerah selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan pasca pandemi *Covid-19*. Peningkatan pertumbuhan pajak daerah tersebut terjadi karena adanya geliat perekonomian pasca pandemi *Covid-19*, sehingga pencapaian terhadap penerimaan pajak daerah bertambah. Pertumbuhan pajak daerah dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu 25,21% sedangkan pertumbuhan pajak untuk tahun 2023 berdasarkan

LRA *Preliminary* per tanggal 11 Januari 2024 sebesar 4,08%. Untuk lebih jelasnya pertumbuhan penerimaan pajak daerah dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.1
Pertumbuhan Pajak Daerah



Penerimaan pajak daerah tumbuh positif setiap tahunnya, namun realisasi pada tahun 2023 tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 5,11%. Diharapkan untuk tahun berikutnya penerimaan pajak daerah dapat meningkat sesuai target yang telah ditetapkan dengan melakukan upaya-upaya yang lebih baik, sehingga dapat menunjang pembangunan daerah di Kabupaten Tasikmalaya.



3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

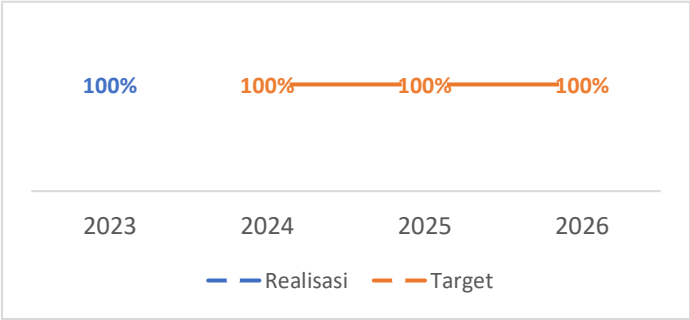
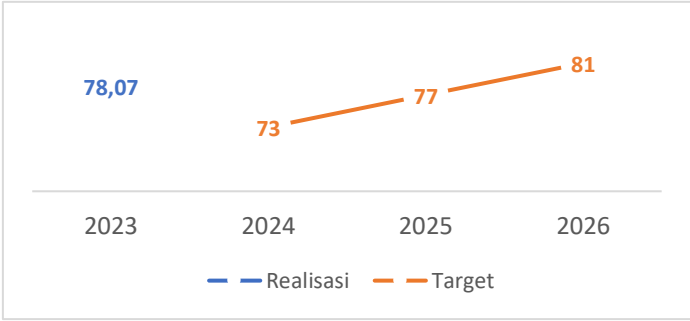
Tabel 3.9
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		%	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
				Target	Realisasi		Target	Target	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	69	78,07	113,14	73	77	81
2.	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Rata-rata persentase penetapan APBD tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	%	100	100	100	100	100	100
3.	Mewujudkan Pengelolaan Aset Daerah yang Tertib dan Akuntabel	Persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan	%	83	84,68	102,02	86	89	90
4.	Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah*	%	5,11	4,08	79,84	5,18	5,24	5,30

*Sumber: BPKPD TA 2023 (Data Preliminary serta diolah) per 11 Januari 2024

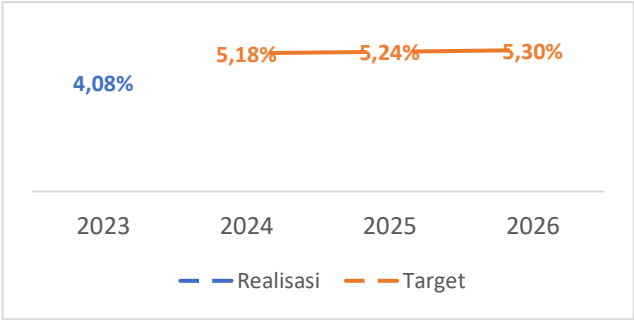
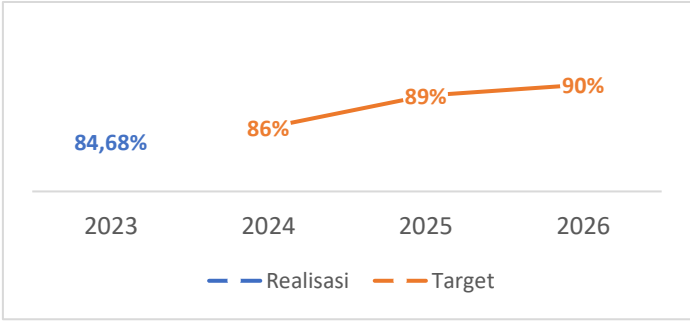
Tahun 2023 merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis 2021-2026 sehingga sudah dapat dilihat adanya perbandingan yang menunjukkan kenaikan/ penurunan capaian kinerja tahunan. Berikut grafik perbandingan capaian indikator kinerja Tahun 2022 dengan target Renstra tahun 2021-2026:

Grafik 3.2
Perbandingan Capaian Tahun 2023 Indikator Kinerja **Nilai Indeks Reformasi Birokrasi** dengan target pada Periode Renstra 2021-2026



Grafik 3.3
Perbandingan capaian Indikator Kinerja Rata-rata persentase APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan target pada Periode Renstra 2021-2026

Grafik 3.4
Perbandingan capaian Indikator Kinerja Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi Dokumen Bukti Kepemilikan dengan target pada Periode Renstra 2021-2026



Grafik 3.5
Perbandingan capaian Indikator Kinerja Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah dengan target pada Periode Renstra 2021-2026

Dari grafik diatas menunjukkan adanya progres yang dilakukan dalam rangka mencapai target akhir renstra. Untuk Indikator Kinerja Nilai Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2023 telah terealisasi sebesar 78,07 dan sampai dengan akhir renstra di tahun 2026 ditargetkan dapat tercapai dengan nilai 81. Apabila dibandingkan dengan target akhir renstra maka telah tercapai sebesar 96,38%. Realisasi pencapaian akhir renstra untuk Indikator Kinerja Rata-rata persentase APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sudah mencapai 100%. Hal tersebut dikarenakan target yang ditentukan konstan setiap tahunnya yaitu 100%.

Pada realisasi pencapaian indikator kinerja Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi Dokumen Bukti Kepemilikan yang sah sebesar 84,68% sedangkan untuk target akhir renstra sebesar 90%. Apabila dibandingkan dengan target akhir renstra maka sampai tahun ketiga Renstra telah mencapai 94,09%. Sedangkan capaian Indikator Kinerja Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah pada tahun 2023 telah mencapai 4,08% dan pada akhir renstra ditargetkan tumbuh sebesar 5,30%. Apabila dibandingkan dengan target akhir renstra maka capaian kinerja sampai dengan tahun 2023 telah mencapai 76,98%. Diharapkan pada tahun terakhir renstra semua indikator dapat tercapai dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.



3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.10
Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
			BPKPD Kabupaten Tasikmalaya	Nasional	BPKPD Kabupaten Tasikmalaya	Nasional
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	69	-	78,07	88,69 (Kementrian Keuangan, 2022)
2.	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Rata-rata persentase penetapan APBD tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaa n keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	100%	100% (dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang APBD TA. tanggal 29 Desember 2023)	100% (dengan ditetapkannya UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN TA. 2024 tanggal 16 Oktober 2023 dan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian APBN TA. 2024 tanggal 28 November 2023
3.	Mewujudkan Pengelolaan Aset Daerah yang Tertib dan Akuntabel	Persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan	83%	-	82,18%	-
4.	Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	5,11%	5,9%	4,08% (data per 15 Januari 2024)	8,9% (data per 3 Januari 2024)

*Sumber: BPKPD TA 2023 (diolah)

Berdasarkan tabel 3.8 Indikator kinerja yang dapat dibandingkan dengan target dan realisasi Nasional yaitu Nilai Reformasi Birokrasi, Rata-rata persentase APBD tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Persentase pertumbuhan pajak daerah. Diantara keempat indikator tersebut, hanya 1 (satu) indikator yang tidak dapat dibandingkan dengan target nasional yaitu untuk indikator persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi bukti kepemilikan.

Secara fungsi BPKPD berada dibawah Kementerian Keuangan RI sehingga kami membandingkan nilai reformasi birokrasi BPKPD dengan Kementerian Keuangan RI, untuk realisasi RB BPKPD pada tahun 2023 sebesar 78,07 sedangkan realisasi RB Kementerian Keuangan RI pada tahun 2022 sebesar 88,69 hal tersebut menunjukkan bahwa RB di BPKPD masih dibawah standar kementerian keuangan sehingga perlu upaya ekstra agar dapat mengimbangi capaian kementerian keuangan.

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 telah dilaksanakan tepat waktu. Penetapan APBD telah dilakukan tepat waktu yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 bahwa penetapan APBD paling lambat akhir Desember (31 Desember). Kabupaten Tasikmalaya telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada tanggal 29 Desember 2023.

Sedangkan untuk APBN sendiri telah ditetapkan tepat waktu dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 pada tanggal 16 Oktober 2023 dan Peraturan

Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.

Persentase pertumbuhan pajak daerah ditargetkan sebesar 5,11% dan telah teralisasi sebesar 4,08% sedangkan untuk persentase pertumbuhan pajak nasional ditargetkan tumbuh sebesar 5,9% dan terealisasi sebesar 8,9%. Penerimaan pajak Nasional pada tahun 2023 mencapai Rp1.869,2 triliun atau 108,8 persen terhadap target APBN atau 102,8 persen terhadap Perpres Nomor 75 Tahun 2023. Penerimaan pajak tersebut berhasil melampaui target yang telah ditetapkan selama tiga tahun berturut-turut sejak tahun 2021. Capaian tersebut meningkat signifikan sebesar 8,9 persen dibandingkan realisasi tahun 2022 yang sebesar Rp1.716,8 triliun (Sumber : <https://www.kemenkeu.go.id/informasipublik/publikasi/berita-utama/Penerimaan-Pajak-2023-Lampaui-Target>).



3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

a. Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Hasil penilaian Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Tim Asesor Kabupaten Tasikmalaya dan Tim Independen Provinsi Jawa Barat yaitu 78,07. Faktor pendukung dalam pencapaian kinerja nilai reformasi birokrasi tersebut antar lain:

1. Adanya dorongan dari pimpinan yang selalu memberikan motivasi serta arah kebijakan bagi pelaksanaan reformasi birokrasi di BPKPD;
2. Adanya komitmen dari seluruh pegawai BPKPD untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. BPKPD terus berupaya untuk melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. BPKPD berupaya untuk melakukan peningkatan kapasitas SDM di lingkungan BPKPD;

5. Meningkatkan pelaksanaan tata laksana di lingkungan BPKPD.

Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan/meningkatkan ketercapaian pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akutabilitas kinerja Perangkat Daerah, antara lain :

1. Mengkaji kembali kertas kerja penilaian Reformasi Birokrasi untuk mendapatkan instrumen apa saja yang dapat ditingkatkan;
2. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam ke seluruh pegawai BPKPD, agar dapat berperan aktif dalam meningkatkan RB di lingkungan BPKPD;
3. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait mengenai penilaian Reformasi Birokrasi.

b. Rata-rata persentase penetapan APBD tepat waktu; pelaporan keuangan; pelayanan penatausahaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Realisasi Indikator kinerja ini pada tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%. Faktor pendukung pencapaian kinerja ini antara lain:

1. Adanya komitmen dari seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya serta stakeholder terkait dalam mendukung pelaksanaan APBD tahun n, penyusunan pelaporan hasil pelaksanaan APBD tahun n serta dalam rangka menyusun APBD tahun n+1;
2. BPKPD berupaya untuk responsif terhadap perubahan peraturan atau kebijakan baru;
3. Adanya dorongan dari pimpinan yang selalu memberikan motivasi serta arah kebijakan bagi pelaksanaan kegiatan di BPKPD;
4. Adanya komitmen dari seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya dalam

mendukung pelaksanaan program/kegiatan BPKPD Kabupaten Tasikmalaya sehingga capaian indikator kinerja BPKPD dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan/meningkatkan ketercapaian pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akutabilitas kinerja Perangkat Daerah, antara lain :

1. Pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
2. Melakukan pembinaan pengelolaan keuangan terhadap Perangkat Daerah serta BLUD;
3. Meningkatkan koordinasi dengan pihak Kementerian, Provinsi dan Perangkat Daerah lainnya yang terkait dalam pengelolaan keuangan daerah;
4. Melakukan inovasi dalam peningkatan pelayanan pengelolaan keuangan daerah.

c. Persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi dengan bukti kepemilikan

Pada realisasi indikator kinerja ini, telah melampaui dari target yang telah ditetapkan. Faktor pendorong dalam pencapaian kinerja ini antara lain:

1. Adanya komitmen antara Pemerintah Daerah dengan KPK RI dalam program MCP (*Monitoring Centre for Prevention*) Korsupgah untuk menyelesaikan pensertifikatan tanah dan bangunan milik Pemerintah Daerah;
2. Adanya dukungan dari Perangkat Daerah untuk melakukan pengelolaan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Adanya komitmen dari seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan BPKPD Kabupaten Tasikmalaya sehingga capaian indikator kinerja BPKPD dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan ketercapaian pada sasaran mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel, antara lain :

1. Mengefektifkan Jadwal pelaksanaan pematokan dan pengukuran bidang tanah;
2. Melakukan pendekatan dengan ahli waris yang memiliki tanah bersengketa agar dapat *clear and clean*;
3. Melakukan kerjasama dengan ATR/BPN untuk dapat membantu memecahkan permasalahan pensertifikatan tanah dan bangunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

d. Persentase pertumbuhan pajak daerah

Realisasi indikator kinerja ini tidak melampaui dari target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, yaitu:

1. Kurangnya sosialisasi dari Pemerintah kepada masyarakat sebagai Wajib Pajak (WP) mengenai pentingnya membayar pajak, manfaat membayar pajak, dan sanksi yang akan diterima apabila WP melalaikan kewajibannya;
2. Daya beli masyarakat yang masih rendah;
3. *Database* yang belum lengkap dan akurat;
4. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM pengelola pajak;
5. Lemahnya penegakan hukum berupa pengawasan; dan
6. Pemberian sanksi yang belum konsisten dan tegas.

Maka upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan hambatan tersebut yaitu :

1. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah;
2. Melakukan penyuluhan kepada pengelola PAD, Kolektor Pajak serta Wajib Pajak;

- 3. Melakukan digitalisasi dengan pengoptimalan ETPD, pemeliharaan database secara berkala, serta sosialisasi dan edukasi melalui media sosial;
- 4. Melakukan peningkatan Sumber Daya Manusia melalui diklat terhadap jabatan pemeriksa, juru sita dan penilai. Bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Administrasi Negara (STAN);
- 5. Mengoptimalkan kerjasama penegakan hukum antara Pemerintah Daerah dengan Aparat Penegak Hukum.



3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.11
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Indikator Kinerja yang ≥ 100%	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi %
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	113,14	33,11	109,20 (Sangat Baik)
2.	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Rata-rata persentase penetapan APBD tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100	98,95	96 (Sangat Baik)
3.	Mewujudkan Pengelolaan Aset Daerah yang Tertib dan Akuntabel	Persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan	99,01	97,80	95,57 (Sangat Baik)
4.	Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah*	79,84	97,03	82,23 (Baik)

*Sumber: BPKPD TA 2023 (Data Preliminary serta diolah) per 11 Januari 2024

- Keterangan:**
- 1 >90% - 100% : Sangat Baik
 - 2 >80% - 90% : Baik
 - 3 >60% - 80% : Cukup
 - 4 >50% - 60% : Kurang

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja dengan penyerapan alokasi anggaran. Tingkat efisiensi didapat dari perhitungan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214 / PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Berdasarkan perhitungan tersebut BPKPD menunjukkan tingkat efisiensi yang sudah sangat baik dimana dari 4 sasaran yang diampu terdapat 3 sasaran yang tingkat efisiennya sangat baik dan 1 sasaran yang tingkat efisiennya baik.

Pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah tingkat penyerapan anggarannya rendah. Hal tersebut dikarenakan terdapat alokasi anggaran yang diperuntukan untuk gaji dan tunjangan PPPK di lingkungan Kabupaten Tasikmalaya yang belum tersalurkan. Sehingga membuat tingkat efisiensi menjadi sangat baik dan melebihi 100%. Sedangkan untuk sasaran dengan efisiensi yang rendah yaitu meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah dengan kategori Baik, hal tersebut dikarenakan pada saat pelaksanaan kegiatan masih ditemukan permasalahan yang dapat menghambat peningkatan pajak daerah.



3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.12

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET	INDIKATOR REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
I	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	69	78,07	113,14	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indikator program ini yaitu Nilai Evaluasi SAKIP dan IKM. SAKIP dan IKM sangat mendukung pada pencapaian kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah serta merupakan aspek hasil dalam RB yang dapat mendongkrak penilaian indeks RB Perangkat Daerah dalam hal peningkatan akuntabilitas dan pelayanan Perangkat Daerah. Sehingga realisasi nilai RB pada tahun 2023 melampaui target dengan capaian sebesar 113,14%
1							Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan ini sangat menunjang terhadap pencapaian indikator program Nilai Evaluasi SAKIP. Pada penilaian SAKIP berisikan pemenuhan terhadap dokumen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Serta mendukung juga pada pencapaian indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
2							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan ini menunjang pada pencapaian indikator program SAKIP, karena pada sub kegiatan yang terdapat dalam kegiatan ini diantaranya yaitu penyaluran gaji dan tunjangan ASN

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET	INDIKATOR REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
3							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan ini menunjang pada pencapaian indikator program nilai indeks kepuasan masyarakat, karena pada sub kegiatan tersebut melaksanakan bimbingan teknis/pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur BPKPD sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menjadi lebih baik
4							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan ini menunjang pada pencapaian indikator program nilai indeks kepuasan masyarakat, karena sub kegiatan pada kegiatan ini sangat mempengaruhi pada penilaian masyarakat terhadap layanan. Maka dari itu kegiatan ini menunjang pada pencapaian indikator kinerja nilai indeks reformasi birokrasi perangkat daerah
5							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan ini menunjang pada pencapaian indikator program nilai indeks kepuasan masyarakat, karena sub kegiatan pada kegiatan ini sangat mempengaruhi pada penilaian masyarakat terhadap layanan. Maka dari itu kegiatan ini menunjang pada pencapaian indikator kinerja nilai indeks reformasi birokrasi perangkat daerah
6							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan ini menunjang pada pencapaian indikator program nilai indeks kepuasan masyarakat, karena sub kegiatan pada kegiatan ini sangat mempengaruhi pada penilaian masyarakat terhadap layanan. Maka dari itu kegiatan ini menunjang pada pencapaian indikator kinerja nilai indeks reformasi birokrasi perangkat daerah

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET	INDIKATOR REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
II	Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel	2	Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100	100	100	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Pada program pengelolaan keuangan daerah terdapat kegiatan untuk PPKD yaitu kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah dengan 3 sub kegiatan. Indikator Program ini yaitu Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah diantaranya yaitu perencanaan anggaran daerah, penatausahaan keuangan daerah, dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Maka program ini sangat mendukung pada pencapaian indikator kinerja Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; pelaporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
1							Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kegiatan ini sangat mendukung pada Indikator program Persentase pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan ini juga mendukung pada pencapaian indikator kinerja Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; pelaporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama sub indikator penetapan APBD yang tepat waktu. Karena dalam output-output sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini merupakan dokumen-dokumen sebagai tahapan penyusunan APBD serta penetapan APBD
2							Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kegiatan ini mendukung pada tercapainya indikator kinerja Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; pelaporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terutama pada sub indikator pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan pada pelaksanaan perbendaharaan daerah merupakan fasilitasi penyaluran belanja daerah serta belanja rutin seperti gaji dan tunjangan

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET	INDIKATOR REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
3							Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kegiatan ini sangat mendukung pada pencapaian indikator kinerja Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; pelaporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena output-output sub kegiatan ini, mendukung pada pelaporan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4							Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kegiatan ini juga mendukung pada tercapainya indikator kinerja Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; pelaporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama pada sub indikator pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dikarenakan pada kegiatan ini juga merupakan fasilitasi penyaluran belanja daerah seperti Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan, Dana Darurat dan Mendesak serta penyaluran dana bagi hasil pajak dan retribusi pajak daerah
III	Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel	3	Persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan	83	84,68	102,02	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indikator program ini yaitu persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan. Maka dari itu, program ini sangat mendukung pada program MCP KPK mengenai penertiban BMD
1							Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kegiatan ini mendukung pada pencapaian kinerja indikator persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan. Diantara sub kegiatan yang terdapat dalam kegiatan ini, sub kegiatan pengamanan BMD yang melaksanakan pensertifikatan bidang tanah

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET	INDIKATOR REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
IV	Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah	4	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	5,11	4,08	79,84	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program ini sangat menunjang pada pencapaian indikator kinerja pertumbuhan pajak daerah. Indikator program ini adalah persentase pengelolaan pajak daerah. Apabila pengelolaan pajak daerah baik, maka pertumbuhan pajak pun akan meningkat.
1							Pengelolaan pendapatan Daerah	Kegiatan ini menunjang pada pencapaian persentase pengelolaan pajak daerah. Diantara sub kegiatan yang terdapat dalam kegiatan ini, yang mempunyai peran secara langsung dalam pertumbuhan pajak daerah antara lain melakukan penagihan pajak daerah, Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Pengendalian dan pemeriksaan pengawasan pajak daerah serta peningkatan pada sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah

*Sumber: BPKPD TA 2023 (Data Sementara, *Unaudited* serta diolah)

3.2 Realisasi Anggaran

Pada tahun 2023 BPKPD melaksanakan 4 program, 12 kegiatan dan 54 sub kegiatan. BPKPD melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan, pendapatan dan aset daerah serta berperan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sehingga dalam pelaksanaan program/kegiatan terdapat kegiatan yang merupakan unsur PPKD. Total anggaran yang diampu sebesar Rp. 809.728.466.043,00 yang terdiri dari belanja untuk gaji dan tunjangan ASN BPKPD dan PPPK di lingkungan Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp. 99.750.717.938,00 penyaluran belanja daerah sebesar Rp. 699.196.251.391,00 serta untuk kegiatan BPKPD sebesar Rp. 10.781.496.714,00. Pelaksanaan sub kegiatan berdasarkan *time schedule* yang telah tertuang dalam dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan dokumen rencana aksi BPKPD Tahun 2023.

Penyerapan total anggaran BPKPD pada tahun 2023 sebesar 90,44% lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan realisasi Rp. 732.327.095.840,00 dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 809.728.466.043,00. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada sasaran Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel sebesar 98,95%. Sedangkan penyerapan terkecil pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akutabilitas Kinerja Perangkat Daerah sebesar 33,11%, penyerapan tersebut rendah dikarenakan sisa anggaran yang belum terserap merupakan gaji dan tunjangan untuk PPPK di lingkungan Kabupaten Tasikmalaya.

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2023 yang dialokasikan untuk

membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 3.12
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR			PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
A	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	69	78,07	113,14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	104.503.039.652	34.603.091.049	33,11	(1) Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah (2) Nilai IKM Perangkat Daerah	(1) 81 (2) 86,75	(1) 80* (2) 86,76	100
I						Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.600.000	53.250.300	99,35	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	96 dokumen	96 dokumen	100
1						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000	29.748.800	99,16	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	26 dokumen	26 dokumen	100
2						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.600.000	23.501.500	99,58	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	70 dokumen	70 dokumen	100
II						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	99.750.717.938	30.016.544.620	30,09	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang Sesuai Aturan	100%	100%	100
1						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	99.750.717.938	30.016.544.620	30,09	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	92 orang	92 orang	100
III						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75.000.000	74.549.429	99,40	Cakupan Peningkatan Kapasitas ASN BPKPD	100%	100%	100
1						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	75.000.000	74.549.429	99,40	Jumlah orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 orang	12 orang	100
IV						Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.758.463.858	1.680.543.139	95,57	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	100%	100%	100

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR			PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
1						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.006.000	30.004.405	99,99	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100
2						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	472.805.000	464.621.029	98,27	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket	3 Paket	100
3						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.000.000	38.957.000	97,39	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100
4						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000	99.200.000	99,20	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100
5						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	530.153.858	477.028.000	89,98	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100
6						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	49.499.000	35.260.000	71,23	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	100
7						Fasilitasi Kunjungan Tamu	146.000.000	146.000.000	100,00	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan	4 Laporan	100
8						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	315.000.000	314.695.715	99,90	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	100
9						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25.000.000	24.776.990	99,11	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100
10						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	50.000.000	50.000.000	100,00	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR			PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
V						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.544.957.714	1.496.899.805	96,89	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100
1						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	843.994.000	827.537.357	98,05	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100
2						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.000.000	57.000.000	100,00	(1) Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (2) Jumlah bulan sewa bangunan	(1) 1 Laporan (2) 12 bulan	(1) 1 Laporan (2) 12 bulan	100
3						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	643.963.714	612.362.448	95,09	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100
VI						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.320.300.142	1.281.303.756	97,05	Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100
1						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	650.300.142	614.461.860	94,49	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	70 Unit	70 Unit	100
2						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	285.000.000	282.362.430	99,07	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	143 Unit	143 Unit	100
3						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	385.000.000	384.479.466	99,86	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	100

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR			PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
B	Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabe	Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaa n keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100	100	100	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	701.570.365.391	694.172.784.632	98,95	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	101,36%	101,36
I						Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.602.539.000	1.589.499.953	99,19	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%	105,45%	105,45
1						Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	50.000.000	48.915.321	97,83	Jumlah dokumen KUA PPAS yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	50.000.000	48.979.970	97,96	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3						Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	40.000.000	38.842.955	97,11	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi	59 Dokumen	59 Dokumen	100
4						Koordinasi, Penyusunan dan VerifikasiPerubahan RKA-SKPD	40.000.000	38.841.457	97,10	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi	59 Dokumen	59 Dokumen	100
5						Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	40.000.000	39.866.120	99,67	Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi	59 Dokumen	59 Dokumen	100
6						Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	40.000.000	39.863.900	99,66	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang diverifikasi	59 Dokumen	59 Dokumen	100

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR			PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
7						Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	210.000.000	209.410.887	99,72	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	100
8						Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	190.000.000	189.320.550	99,64	Jumlah Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	100
9						Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	105.000.000	104.861.740	99,87	Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran	5 Dokumen	8 Dokumen	160
10						Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	430.000.000	428.737.625	99,71	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100
11						Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	407.539.000	401.859.428	98,61	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	440 Orang	440 Orang	100
II						Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	289.675.000	289.265.697	99,86	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%	100%	100
1						Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	92.875.000	92.725.000	99,84	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	59 Dokumen	59 Dokumen	100

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR			PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
2						Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	98.400.000	98.158.500	99,75	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	100
3						Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutandan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	98.400.000	98.382.197	99,98	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan	12 Dokumen	12 Dokumen	100
III						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	481.900.000	454.400.705	94,29	Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	100%	100
1						Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	124.000.000	116.245.111	93,75	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	16 Dokumen	16 Dokumen	100
2						Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	116.900.000	103.226.246	88,30	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	17 Laporan	17 Laporan	100
3						Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	50.000.000	47.014.238	94,03	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	1 Laporan	100

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR			PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
4						Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	150.000.000	147.869.660	98,58	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	2 Dokumen	2 Dokumen	100
5						Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	41.000.000	40.045.450	97,67	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban	59 Orang	59 Orang	100
IV						Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	699.196.251.391	691.839.618.277	98,95	Persentase Fasilitasi Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	100
1						Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	655.087.943.000	652.146.914.700	99,55	Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	12 Laporan	12 Laporan	100
2						Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	31.458.863.083	30.279.044.577	96,25	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	1 Laporan	1 Laporan	100
3						Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	12.649.445.308	9.413.659.000	74,42	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	100
C	Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel	Persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan	83	84,68	102,02	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	624.000.000	610.273.240	97,80	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Telah Dilengkapi Dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	83	84,68	102,02

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR			PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
I						Pengelolaan Barang Milik Daerah	624.000.000	610.273.240	97,80	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100
1						Penyusunan Standar Harga	70.000.000	68.723.840	98,18	Jumlah Standar Harga yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100
2						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	30.000.000	29.918.400	99,73	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100
3						Pengamanan Barang Milik Daerah	277.000.000	265.906.000	95,99	Jumlah laporan hasil pengamanan barang milik daerah	4 Laporan	4 Laporan	100
4						Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	247.000.000	245.725.000	99,48	(1) Jumlah laporan hasil Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (2) Jumlah SKPD	(1) 12 Laporan (2) 59 SKPD	(1) 12 Laporan (2) 59 SKPD	100
D	Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	5,11	4,08	79,84	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.031.061.000	2.940.946.919	97,03	Persentase Pengelolaan Pajak Daerah	100%	100%	100
I						Pengelolaan pendapatan Daerah	3.031.061.000	2.940.946.919	97,03	Persentase Pengelolaan Pajak Daerah	100%	100%	100
1						Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	164.641.000	164.541.696	99,94	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100
2						Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	84.000.000	83.911.442	99,89	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100
3						Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1.311.000.000	1.303.476.830	99,43	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	6 Unit	6 Unit	100

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR		PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN			
			TARGET	REALISASI		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
4					Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	54.070.000	53.976.504	99,83	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100
5					Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	514.520.000	514.234.592	99,94	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	12 Layanan	12 Layanan	100
6					Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	38.256.000	38.185.000	99,81	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	12 Dokumen	100
7					Penagihan Pajak Daerah	764.000.000	682.411.633	89,32	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	100
8					Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	100.574.000	100.209.222	99,64	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100
						809.728.466.043	732.327.095.840	90,44	OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN (%)			101,11

*Sumber: BPKPD TA 2022 (Data preliminary serta diolah) per 11 Januari 2024

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis BPKPD Tahun 2023 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang baik, meskipun terdapat indikator yang tidak mencapai dari target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen Perangkat Daerah, masyarakat dan dunia usaha. Dari 4 (empat) indikator tersebut terdapat 2 (dua) indikator dengan hasil realisasi melampaui target yang telah ditetapkan yaitu Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan capaian kinerja 113,14% dan Persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan dengan capaian kinerja 102,02%. Indikator yang sesuai target dengan capaian 100% yaitu Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Sedangkan 1 (satu) indikator tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu persentase pertumbuhan pajak daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah tahun 2023 merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*). LKIP menyajikan informasi kinerja yang terukur dengan menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran strategis tahun 2023 serta menggambarkan perkembangan pencapaian kinerja selama beberapa tahun. Penyajian LKIP berdasarkan ketentuan yang telah tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja serta Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Untuk mencapai sasaran tersebut berbagai upaya telah dilakukan seperti peningkatan kapasitas aparatur di lingkungan BPKPD, melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melakukan pensertipikatan terhadap tanah dan bangunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta meningkatkan pelayanan Pajak Daerah.

Penyerapan BPKPD pada tahun 2023 sebesar 90,44% dengan realisasi Rp. 732.327.095.840,00 dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 809.728.466.043,00. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada sasaran Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel sebesar 98,95%. Sedangkan penyerapan terkecil pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akutabilitas Kinerja Perangkat Daerah sebesar 33,11%, penyerapan tersebut rendah dikarenakan alokasi Anggaran untuk gaji dan tunjangan untuk PPPK pada Tahun 2023 di lingkungan Kabupaten Tasikmalaya tidak terserap.

Dalam pelaksanaan fungsinya, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya terus berupaya melakukan perbaikan internal berupa penyempurnaan tata kelola dan pelayanan. Perbaikan tersebut didukung dengan berbagai inovasi dan efisiensi yang didasari pada transformasi organisasi, sumber daya manusia (SDM), dan pemanfaatan teknologi informasi serta didukung dengan peningkatan integritas. Transformasi dan perbaikan yang telah dilakukan sepanjang tahun 2023 akan menjadi modal dasar untuk mendorong pencapaian sasaran BPKPD untuk tahun berikutnya.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis BPKPD Tahun 2023 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang baik, meskipun terdapat indikator yang tidak mencapai dari target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen Perangkat Daerah, masyarakat dan dunia usaha. Dari 4 (empat) indikator tersebut terdapat 2 (dua) indikator dengan hasil realisasi melampaui target yang telah ditetapkan yaitu Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan capaian kinerja 113,14% dan Persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan dengan capaian kinerja 102,02%. Indikator yang sesuai target dengan capaian 100% yaitu Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Sedangkan 1 (satu) indikator tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu persentase pertumbuhan pajak daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah tahun 2023 merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*). LKIP menyajikan informasi kinerja yang terukur dengan menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran strategis tahun 2023 serta menggambarkan perkembangan pencapaian kinerja selama beberapa tahun. Penyajian LKIP berdasarkan ketentuan yang telah tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja serta Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Untuk mencapai sasaran tersebut berbagai upaya telah dilakukan seperti peningkatan kapasitas aparatur di lingkungan BPKPD, melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melakukan pensertipikatan terhadap tanah dan bangunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta meningkatkan pelayanan Pajak Daerah.

Penyerapan BPKPD pada tahun 2023 sebesar 90,44% dengan realisasi Rp. 732.327.095.840,00 dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 809.728.466.043,00. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada sasaran Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel sebesar 98,95%. Sedangkan penyerapan terkecil pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akutabilitas Kinerja Perangkat Daerah sebesar 33,11%, penyerapan tersebut rendah dikarenakan alokasi Anggaran untuk gaji dan tunjangan untuk PPPK pada Tahun 2023 di lingkungan Kabupaten Tasikmalaya tidak terserap.

Dalam pelaksanaan fungsinya, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya terus berupaya melakukan perbaikan internal berupa penyempurnaan tata kelola dan pelayanan. Perbaikan tersebut didukung dengan berbagai inovasi dan efisiensi yang didasari pada transformasi organisasi, sumber daya manusia (SDM), dan pemanfaatan teknologi informasi serta didukung dengan peningkatan integritas. Transformasi dan perbaikan yang telah dilakukan sepanjang tahun 2023 akan menjadi modal dasar untuk mendorong pencapaian sasaran BPKPD untuk tahun berikutnya.

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi di Pusat, Provinsi maupun Daerah akan dilakukan dengan lebih intensif serta melakukan berbagai upaya dalam rangka peningkatan pajak daerah. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja BPKPD Kabupaten Tasikmalaya kepada pihak-pihak terkait, serta hasil pengukuran tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai pijakan untuk peningkatan kinerja dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya



Drs. RONPA. SAHRONI, M.M
NIP. 19681008 198803 1 003

LAMPIRAN

Tabel 1
Tujuan Badan Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Daerah

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja PD Tahun 2023
1	Meningkatnya tata kelola Keuangan yang akuntabel dan berorientasi pelayanan prima	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	78,019

Tabel 2
Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Indikator Sasaran PD Tahun 2023
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akutabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	69
2	Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100
3	Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	83
4	Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	5,11

Tabel 3
Rencana Perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun Anggaran 2023

Rencana Perubahan Tahun 2023 (tahun rencana)									
No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp.)		Sumber Dana
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	81,00	81,00	37.552.040.828	107.063.122.249	APBD II
		Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai IKM Perangkat Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	86,75	86,75	4.150.927.163	4.150.927.163	
I	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	96 dokumen	96 dokumen	45.000.000	45.000.000	APBD II
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	26 Dokumen	26 Dokumen	30.000.000	30.000.000	APBD II
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	70 Dokumen	70 Dokumen	15.000.000	15.000.000	APBD II
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang Sesuai Aturan	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang Sesuai Aturan	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	100%	100%	37.507.040.828	107.018.122.249	APBD II
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	1302 Orang	95 Orang	37.507.040.828	107.018.122.249	APBD II

Rencana Perubahan Tahun 2023 (tahun rencana)									
No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp.)		Sumber Dana
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Peningkatan Kapasitas ASN BPKPD	Cakupan Peningkatan Kapasitas ASN BPKPD	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	100%	100%	75.000.000	75.000.000	APBD II
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	8 orang	8 orang	75.000.000	75.000.000	APBD II
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	100%	100%	1.628.464.000	1.628.464.000	APBD II
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	1 Paket	1 Paket	30.006.000	30.006.000	APBD II
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	3 paket	3 paket	472.805.000	472.805.000	APBD II
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	1 paket	1 paket	40.000.000	40.000.000	APBD II
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	1 paket	1 paket	100.000.000	100.000.000	APBD II
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	1 paket	1 paket	530.154.000	530.154.000	APBD II
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	4 dokumen	4 dokumen	34.499.000	34.499.000	APBD II

Rencana Perubahan Tahun 2023 (tahun rencana)									
No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp.)		Sumber Dana
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	4 laporan	4 laporan	96.000.000	96.000.000	APBD II
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	4 laporan	4 laporan	250.000.000	250.000.000	APBD II
9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	1 dokumen	1 dokumen	25.000.000	25.000.000	APBD II
10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	APBD II
V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	100%	100%	1.467.463.163	1.467.463.163	APBD II
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	12 laporan	12 laporan	778.294.000	778.294.000	APBD II
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan - Jumlah Bulan Sewa Bangunan Gudang	- Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan - Jumlah Bulan Sewa Bangunan Gudang	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	- 1 laporan - 12 bulan	- 1 laporan - 12 bulan	57.000.000	57.000.000	APBD II

Rencana Perubahan Tahun 2023 (tahun rencana)									
No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp.)		Sumber Dana
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	12 laporan	12 laporan	632.169.163	632.169.163	APBD II
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	100%	100%	980.000.000	980.000.000	APBD II
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	70 unit	70 unit	600.000.000	600.000.000	APBD II
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	143 unit	143 unit	250.000.000	250.000.000	APBD II
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	3 unit	3 unit	130.000.000	130.000.000	APBD II
B	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	100%	100%	688.481.975.569	688.481.975.569	APBD II
I	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	100%	100%	1.374.539.000	1.374.539.000	APBD II
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA PPAS yang disusun	Jumlah dokumen KUA PPAS yang disusun	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	1 dokumen	1 dokumen	50.000.000	50.000.000	APBD II
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	1 dokumen	1 dokumen	50.000.000	50.000.000	APBD II

Rencana Perubahan Tahun 2023 (tahun rencana)									
No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp.)		Sumber Dana
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	59 dokumen	59 dokumen	40.000.000	40.000.000	APBD II
4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	59 dokumen	59 dokumen	40.000.000	40.000.000	APBD II
5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi	Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	59 dokumen	59 dokumen	40.000.000	40.000.000	APBD II
6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang diverifikasi	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang diverifikasi	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	59 dokumen	59 dokumen	40.000.000	40.000.000	APBD II
7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	2 dokumen	2 dokumen	190.000.000	190.000.000	APBD II
8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	2 dokumen	2 dokumen	190.000.000	190.000.000	APBD II
9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	2 dokumen	2 dokumen	80.000.000	80.000.000	APBD II
10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	1 dokumen	1 dokumen	330.000.000	330.000.000	APBD II

Rencana Perubahan Tahun 2023 (tahun rencana)									
No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp.)		Sumber Dana
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
11	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	396 orang	396 orang	324.539.000	324.539.000	APBD II
II	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	100%	100%	281.675.000	281.675.000	APBD II
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	59 Dokumen	59 Dokumen	92.875.000	92.875.000	APBD II
2	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	12 Dokumen	12 Dokumen	94.400.000	94.400.000	APBD II
3	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	12 Dokumen	12 Dokumen	94.400.000	94.400.000	APBD II
III	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	100%	100%	453.900.000	453.900.000	APBD II

Rencana Perubahan Tahun 2023 (tahun rencana)									
No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp.)		Sumber Dana
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	16 dokumen	16 dokumen	100.000.000	89.000.000	APBD II
2	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	17 laporan	17 laporan	78.900.000	89.900.000	APBD II
3	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	Jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	1 laporan	1 laporan	50.000.000	50.000.000	APBD II
4	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	2 dokumen	2 dokumen	150.000.000	150.000.000	

Rencana Perubahan Tahun 2023 (tahun rencana)									
No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp.)		Sumber Dana
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
5	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah	Jumlah sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	APBD II
6	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	59 orang	59 orang	25.000.000	25.000.000	APBD II
IV	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Fasilitas Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Fasilitas Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	100%	100%	686.371.861.569	686.371.861.569	APBD II
1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	12 Laporan	12 Laporan	645.731.929.000	645.731.929.000	APBD II
2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000.000	30.000.000.000	APBD II
3	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/Kota	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	1 Laporan	1 Laporan	10.639.932.569	10.639.932.569	APBD II
C	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	83%	83%	516.000.000	516.000.000	APBD II

Rencana Perubahan Tahun 2023 (tahun rencana)									
No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp.)		Sumber Dana
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
I	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	100%	100%	516.000.000	516.000.000	APBD II
1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang disusun	Jumlah Standar Harga yang disusun	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	1 dokumen	2 dokumen	70.000.000	70.000.000	APBD II
2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	1 dokumen	2 dokumen	30.000.000	30.000.000	APBD II
3	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil pengamanan barang milik daerah	Jumlah laporan hasil pengamanan barang milik daerah	Kabupaten Tasikmalaya	4 laporan	4 laporan	227.000.000	227.000.000	APBD II
4	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	- Jumlah laporan hasil Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah - Jumlah SKPD	- Jumlah laporan hasil Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah - Jumlah SKPD	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	- 2 laporan - 59 SKPD	- 12 laporan - 59 SKPD	189.000.000	189.000.000	APBD II
D	Program Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Pengelolaan Pajak Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	100%	100%	2.666.061.000	2.666.061.000	APBD II
I	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Pengelolaan Pajak Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	100%	100%	2.666.061.000	2.666.061.000	APBD II
1	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000	125.000.000	APBD II

Rencana Perubahan Tahun 2023 (tahun rencana)									
No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp.)		Sumber Dana
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
2	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Jumlah laporan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	4 laporan	4 laporan	80.000.000	80.000.000	APBD II
3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	5 unit	6 unit	1.050.000.000	1.050.000.000	APBD II
4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek pajak dan Wajib pajak daerah	Jumlah laporan hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek pajak dan Wajib pajak daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	1 laporan	1 laporan	50.000.000	50.000.000	APBD II
5	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	17 layanan	12 layanan	484.520.000	484.520.000	APBD II
6	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	12 dokumen	12 dokumen	38.256.000	38.256.000	APBD II
7	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	Kabupaten Tasikmalaya	12 dokumen	12 dokumen	754.000.000	754.000.000	APBD II
8	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	Kabupaten Tasikmalaya	4 dokumen	4 dokumen	84.285.000	84.285.000	APBD II
TOTAL							733.367.004.560	802.878.085.981	



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **Drs. RONI A SAHRONI, M.M**

Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ADE SUGIANTO**

Jabatan : **BUPATI TASIKMALAYA**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

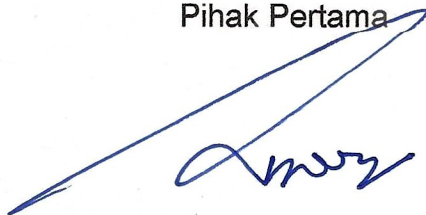
Pihak kedua melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaparna, Desember 2023

Pihak Kedua


ADE SUGIANTO

Pihak Pertama



Drs. RONI A SAHRONI, M.M
Pembina Utama Muda
Nip. 19681008 198803 1 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2023

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	69
2	Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel	Rata-rata persentase penetapan APBD tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%
3	Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan	83%
4	Meningkatkan pertumbuhan pajak daerah	Persentase pertumbuhan pajak daerah	5,11%

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	104.503.039.652,00
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	701.570.365.391,00
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	624.000.000,00
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.031.061.000,00

BUPATI TASIKMALAYA

ADE SUGIANTO

Singaparna, Desember 2023
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya

Drs. RONI A. SAHRONI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681008 198803 1 003